

DISERTASI

**EVALUASI KEBIJAKAN DIVERSIFIKASI PANGAN
BERBASIS RUMAH TANGGA DI KABUPATEN GOWA**

Oleh:

**ANDI ERNI
E01 32 01 004**



**PROGRAM DOKTORAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**EVALUASI KEBIJAKAN DIVERSIFIKASI PANGAN BERBASIS RUMAH
TANGGA DI KABUPATEN GOWA**

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor Pada
Program Studi Doktor Administrasi Publik

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI ERNI
E013201004**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
HASANUDDIN MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**EVALUASI KEBIJAKAN DIVERSIFIKASI PANGAN BERBASIS
RUMAH TANGGA DI KABUPATEN GOWA**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI ERNI

E013201004

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 31 Januari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

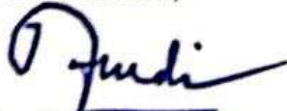
Menyetujui

Promotor



Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si.
Nip. 196012311986011005

Co. Promotor,



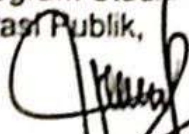
Dr. H. Nurdin Nara, M.Si.
Nip. 196309031989031002

Co. Promotor,



Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.
Nip. 197508182008011008

Ketua Program Studi,
Administrasi Publik,



Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si.
Nip. 196012311986011005

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,

Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.
Nip. 197508182008011008



PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : **ANDI ERNI**

NIM : **E013201004**

PROGRAM STUDI : **Administrasi Publik**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan



ANDI ERNI
NIM. E013201004

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi dengan judul “Evaluasi Kebijakan Diversifikasi Pangan Berbasis Rumah Tangga di Kabupaten Gowa.” dengan tepat waktu sesuai yang telah direncanakan.

Disertasi ini merupakan salah satu syarat guna meraih gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin Makassar. Salam dan Sholawat atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW , suri tauladan umat manusia hingga akhir zaman. Disertasi ini berisi hasil penelitian Evaluasi Kebijakan Diversifikasi Pangan Berbasis Rumah Tangga Di Kabupaten Gowa. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Disertasi ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Bukan hal yang mudah bagi penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini, berbagai kendala dan tantangan yang penulis hadapi dalam pembuatan disertasi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak, maka disertasi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan tulus memberikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak **Prof. Dr. Muhammad Akmal Ibrahim, M.Si.** selaku Promotor, Bapak **Dr. Nurdin Nara, M.Si** selaku Copromotor 1 (satu),

Bapak **Dr. Phil. Sukri., M.Si.** selaku Copromotor 2 (dua) yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.

Dalam menyelesaikan penyusunan Disertasi ini banyak pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dan motivasi, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sedalam dalamnya secara khusus kepada kedua orang tua tercinta almarhum Drs. Andi Rumanga Padlan dan almarhumah Hj. Rahmah. Suami Drs. A. Kasymir Sinrang, M.Tr.AP yang memberikan support serta doa demi kelancaran studi. Kepada ananda yang tersayang dr. Andini Pratiwi Islami, Fatwal Islamiaty, SH dan Nabila Cantika Maharani terima kasih selalu hadir memberikan motivasi dan semangat kepada penulis. Juga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Unhas beserta para pembantu Rektor Universitas Hasanuddin dan Staf.
2. Bapak Dr. Phil. Sukri., M. Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Staf.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akmal Ibrahim, M.Si., selaku Ketua Program Studi S3 Administrasi Publik.
4. Bapak Prof. Dr. Alwi, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.

5. Bapak Dr. Muhammad Rusdi, M.Si dan Dr. Badu, M.Si selaku Tim Penguji yang telah menyempatkan waktu untuk memberi arahan, saran dan kritikan terhadap penyusunan Disertasi ini.
6. Para Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi publik FISIP Universitas Hasanuddin atas bimbingan, arahan, didikan dan motivasi yang diberikan selama kurang lebih 2 (dua) tahun perkuliahan.
7. Para Staf Sekretariat Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
8. Kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Staf Kabupaten Gowa
9. Kepada Ketua dan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Gowa
10. Kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan beserta Staf.
11. Kepada Ibu Ir. Hj. Fitriani, MP selaku mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan.
12. Kepada adinda Dian Engriany Amir, SP, MP selaku Petugas Teknis Pelaksana Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan.
13. Kepada para Ketua Kelompok Wanita Tani dan anggota, Penerima Manfaat Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kabupaten Gowa
14. Kawan-kawan Mahasiswa S3 Administrasi Publik Angkatan 2020 tanpa terkecuali untuk persahabatan, kebersamaan dan semangat yang telah

diberikan serta menorehkan kenangan dan kesan yang tak terlupakan bagi penulis.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis. Penulis berharap semoga Disertasi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan penelitian yang terkait Evaluasi Kebijakan Diversifikasi Pangan Berbasis Rumah Tangga di Kabupaten Gowa. Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima Kasih, *Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Januari 2023

Andi Erni

ABSTRAK

Andi Erni. *Evaluasi Kebijakan Diversifikasi Pangan Berbasis Rumah Tangga di Kabupaten Gowa* (dibimbing oleh Muhammad Akmal Ibrahim, Nurdin Nara dan Sukri)

Permasalahan yang berkaitan dengan Kebijakan Peningkatan Diversifikasi Pangan di Kabupaten Gowa selama kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu belum tercapainya berbagai target kebijakan yang lebih diprioritaskan kepada diversifikasi pangan yakni penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan berbasis rumah tangga. Hal ini menyebabkan banyaknya kelembahan dan bahkan tidak optimalnya tercapai sasaran yang diinginkan oleh skim kebijakan diversifikasi pangan, khususnya pada program berbasis rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi serta menganalisis capaian Kebijakan Diversifikasi Pangan Berbasis Rumah Tangga di Kabupaten Gowa, dengan penekanan pada pendekatan kriteria evaluasi kebijakan publik yang dijelaskan oleh William Dunn.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, dalam menjelaskan permasalahan evaluasi kebijakan diversifikasi pangan, dengan mengacu pada kriteria evaluasi William Dunn. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif interaktif dengan pendekatan Miles Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mengacu pada kriteria evaluasi yang dikembangkan, aspek efektifitas kebijakan sifatnya jangka pendek belum berdampak pada peningkatan gizi dan pendapatan masyarakat. Sementara kriteria efisiensi kebijakan belum berjalan dengan baik, pada penggunaan anggaran serta kriteria kecukupan dana kebijakan hanya bertahan pada tahun tahun awal, sehingga cenderung program tidak berlanjut. Kriteria pemerataan kebijakan belum tercapai karena jumlah kelompok yang terbatas sehingga program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) maupun Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ini belum hadir di setiap Kecamatan dan responsivitas kebijakan cenderung tidak memberi dampak pada peningkatan gizi dan kesejahteraan masyarakat. Kriteria ketepatan masih kurang tepat, diantaranya ketepatan penggunaan anggaran, ketepatan pola penanaman, ketepatan manajemen kelompok dan ketepatan model pendampingan. Temuan model rekomendasi kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga yang efektif kepada kriteria evaluasi yaitu dengan melakukan perubahan skema anggaran dengan model bertahap dan berbasis kinerja, peningkatan kapasitas kelompok, adanya kompetisi antar penerima program serta reward kelompok yang berprestasi.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Diversifikasi pangan, kesejahteraan masyarakat

ABSTRACT

Andi Erni. Evaluation of Household-Based Food Diversification Policy in Gowa Regency (supervised by Muhammad Akmal Ibrahim, Nurdin Nara and Sukri)

Problems related to the Policy to Increase Food Diversification in Gowa Regency over the past 10 years, namely the failure to achieve various policy targets that prioritize food diversification, namely consumption diversification and household-based food security. This causes a lot of weakness and even not optimal in achieving the targets desired by the food diversification policy scheme, especially in household-based programs. This study aims to evaluate and analyze the achievements of the Household-Based Food Diversification Policy in Gowa Regency, with an emphasis on the public policy evaluation criteria approach described by William Dunn.

The research method used is a qualitative method, in explaining the problem of evaluating food diversification policies, with reference to William Dunn's evaluation criteria. Data collection techniques using in-depth interviews, observation, and documentation studies. The data analysis technique uses an interactive qualitative approach with the Miles Huberman approach.

The results of this study indicate that with reference to the evaluation criteria developed, the short-term aspects of policy effectiveness have not had an impact on improving nutrition and people's income. While the criteria for policy efficiency have not gone well, the use of the budget and the criteria for adequacy of funds, policies only last in the early years, so the program tends not to continue. The criteria for policy alignment have not been achieved due to the limited number of groups so that the Sustainable Food Home Area (KRPL) and Sustainable Food Yard (P2L) programs have not yet been present in every District and the responsiveness of the policy tends not to have an impact on improving nutrition and community welfare. The criteria for accuracy are still not quite right, including the accuracy of budget use, the accuracy of planting patterns, the accuracy of group management and the accuracy of the mentoring model. The findings of the recommendation model for an effective household-based food diversification policy for the evaluation criteria are by changing the budget scheme to a gradual and performance-based model, increasing group capacity, competition between program recipients and rewarding groups that excel.

Keywords: Policy Evaluation, Food diversification, community welfare

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN DISERTASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Perkembangan Paradigma Administrasi Publik.....	18
B. Efektivitas	26
C. Kebijakan Publik	28
1. Tahap-Tahap Kebijakan Publik	30
2. Jenis Kebijakan Publik	32
D. Implementasi Kebijakan	35
E. Evaluasi Kebijakan	39
F. Kebijakan Diversifikasi Pangan	52
G. Program Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).....	61
H. Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).....	66
I. Penelitian Tedahulu.....	70
J. Kerangka Pikir	92
BAB III METODE PENELITIAN	96
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	96
B. Fokus Penelitian	97
C. Lokasi Penelitian	101
D. Waktu Dan Jadwal Penelitian	101
E. Sumber Data	101
F. Teknik Pengumpulan Data	101
G. Analisis Data.....	103
H. Informan Penelitian.....	106
I. Pengecekan Keabsahan Data	107
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	110
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	110
B. Dinas Ketahanan Pangan.....	115
C. Hasil Penelitian.....	122

1. Efektifitas kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa.....	124
2. Efisiensi kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa.....	130
3. Kecukupan kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa.....	137
4. Perataan kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa.....	144
5. Responsivitas kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa.....	154
6. Ketepatan kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa.....	159
7. Existing Model Evaluasi kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa	166
D. Pembahasan	170
1. Efektifitas kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa.....	171
2. Efisiensi kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa.....	173
3. Kecukupan kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa.....	176
4. Perataan kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa.....	178
5. Responsivitas kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa.....	180
6. Ketepatan kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa.....	182
7. Model rekomendasi kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa.....	186
BAB V PENUTUP.....	200
A. Kesimpulan.....	200
B. Saran.....	200
DAFTAR PUSTAKA.....	205
LAMPIRAN.....	211

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Indikator evaluasi kebijakan menurut William Dunn (2003)	5
Tabel 2.	Daftar Usulan Penerima Bantuan Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Kabupaten Gowa 2020 yang bersumber dari APBD	11
Tabel 3.	Tabel Pergeseran paradigma administrasi public	25
Tabel 4.	Penelitian Terdahulu	83
Tabel 5.	Daftar Kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Gowa	111
Tabel 6.	Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2019-2021	112
Tabel 7.	Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Gowa	113
Tabel 8.	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kuintal)	114
Tabel 9.	Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian 2017-2021	115
Tabel 10.	Data Ketersediaan Energi Per Kapita Per Hari Tahun 2016 s.d 2020	118
Tabel 11.	Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	120
Tabel 12.	Penanganan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Gowa	120
Tabel 13.	Perkembangan Pola Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	121
Tabel 14.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Gowa, Tahun 2016 – 2020	122
Tabel 15.	Persentasi Stunting Kabupaten Gowa	126
Tabel 16.	Rincian Anggaran Untuk Penggunaan Kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Non Bekerja	132
Tabel 17.	Rincian Anggaran untuk Bantuan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Bekerja	133
Tabel 18.	Item Alokasi Anggaran untuk Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	134
Tabel 19.	Alokasi Anggaran Tahap Penumbuhan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	138
Tabel 20.	Alokasi Anggaran Tahap Penumbuhan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	138
Tabel 21.	Alokasi Anggaran Tahap Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	141
Tabel 22.	Alokasi Anggaran Tahap Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	141
Tabel 23.	Jumlah kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Kabupaten Gowa	146

Tabel 24.	Daftar Penerima Bantuan Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Kabupaten Gowa, 2020 yang bersumber dari APBD	150
Tabel 25.	Penerima Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2021.....	151
Tabel 26.	Daftar Keberlanjutan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Kabupaten Gowa.....	160
Tabel 27.	Anggaran Tahap Penumbuhan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Kabupaten Gowa	174

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kerangka Pikir	95
Gambar 2.	Komponen- Komponen Analisis Data Model Interaktif, (Miles, Huberman & Saldana, 2014:14)	103
Gambar 3	Susunan Organisasi	116
Gambar 4.	Existing Model evaluasi kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa.....	169
Gambar 5.	Keterkaitan Berbagai Kriteria Evaluasi William N Dunn..	185
Gambar 6.	Rekomendasi Model (<i>recommended model</i>)	198

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma kebijakan pangan yang diterapkan di Indonesia harus berubah dari ketahanan pangan menjadi kemandirian pangan. Hal ini agar Indonesia tidak tergantung pada negara lain terutama untuk masalah pangan. Salah satu kebijakan yang sesuai untuk diterapkan dalam mencapai kemandirian pangan dan mengantisipasi krisis pangan adalah diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan merupakan suatu proses penganekaragaman pangan atau upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.

Berbagai kebijakan dirumuskan untuk mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia, bukan hanya pada level kuantitas ketersediaan komoditas pangan tetapi juga kualitas gizi masyarakat. Dalam usaha pemenuhan kebutuhan pangan, Pemerintah Indonesia telah berupaya secara maksimal agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi. Keseriusan itu diwujudkan dalam bentuk cita-cita besar yaitu mampu mencapai swasembada pangan, yang akhirnya tercapai pada tahun 1984 dengan swasembada beras walaupun sebetulnya swasembada beras ditargetkan tercapai pada tahun 1974 (Rahardjo, 1993).

Menurut Dewi dan Ginting (2012), Indonesia berusaha dengan segala upaya untuk mencapai swasembada pangan sejak tahun 1952 sampai saat ini. Pencapaian swasembada pangan 1984 tidak mampu dijaga secara berkelanjutan. Upaya pencapaian swasembada pangan tidak disertai oleh upaya penguatan ketahanan pangan.

Konsep diversifikasi pangan telah banyak dirumuskan dan diinterpretasikan oleh para pakar. Kasryno et al. (1993) memandang diversifikasi pangan sebagai upaya yang sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan pertanian di bidang pangan dan perbaikan gizi masyarakat, yang mencakup aspek produksi, konsumsi, pemasaran, dan distribusi. Suhardjo (1998) mengemukakan bahwa pada dasarnya diversifikasi pangan mencakup tiga ruang lingkup pemahaman yang saling terkait, yaitu diversifikasi konsumsi pangan, diversifikasi ketersediaan pangan dan diversifikasi produksi pangan. Keduanya menjelaskan secara luas tentang konsep diversifikasi, tidak hanya dalam hal konsumsi pangan, tetapi juga dalam hal produksi dan pasokan pangan, termasuk distribusinya.

Soetrisno (1998) mendefinisikan secara sempit diversifikasi pangan dalam konteks konsumsi pangan. Diversifikasi pangan dianggap sebagai upaya untuk mendiversifikasi jenis pangan yang dikonsumsi, termasuk pangan sumber energi dan gizi, guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi sesuai dengan kecukupan kuantitas dan kualitas. Menurut Ariani dan

Ashari (2003), hal itu sangat relevan dalam konteks peningkatan mutu gizi masyarakat secara kualitas dan kuantitas, juga sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain Pakpahan dan Suhartini (1989) menyatakan bahwa dalam konteks Indonesia, keanekaragaman konsumsi pangan sering diartikan sebagai pengurangan konsumsi beras yang dikompensasi oleh penambahan konsumsi bahan pangan non beras.

Kebijakan tentang diversifikasi pangan di Indonesia sudah mulai pada akhir Pelita I (1974), secara eksplisit pemerintah mencanangkan kebijaksanaan diversifikasi pangan melalui Inpres No. 14 tahun 1974 tentang Upaya Perbaikan Menu Makanan Rakyat (UPMMR), dan disempurnakan melalui Inpres No.20 tahun 1979. Setelah itu, Secara eksplisit baru pada tahun 1991/1992 pemerintah melalui Departemen Pertanian mulai menggarap diversifikasi konsumsi melalui Program Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG). Kemudian pada tahun anggaran 1998/ 1999 dilakukan revitalisasi program DPG untuk memberikan respon yang lebih baik dalam rangka meningkatkan diversifikasi pangan pokok. Setelah itu muncul lagi berbagai kebijakan tentang diversifikasi pangan dan program yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian, yang terbaru mengacu pada Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012.

Berdasarkan hasil penelitian Ariani dan Ashari (2003), beberapa faktor yang menjadi kendala terhambatnya diversifikasi konsumsi pangan adalah : (1) rasa beras memang lebih enak dan mudah diolah, (2) ada

konsep makan yang keliru, belum dikatakan makan kalau belum makan nasi, (3) beras sebagai komoditas superior, (4) ketersediaan beras melimpah dan harganya murah, (5) pendapatan rumah tangga masih rendah, (6) teknologi pengolahan dan promosi pangan non beras (pangan lokal) masih terbatas, (7) kebijakan pangan yang tumpang tindih dan (8) adanya kebijakan impor gandum, jenis product development cukup banyak dan promosi yang gencar. Kebijakan diversifikasi konsumsi pangan masih tetap diperlukan. Selain bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya manusia dampak positif dari pelaksanaan program diversifikasi konsumsi pangan adalah memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani dan agroindustri pangan serta menghemat devisa. Keberhasilan diversifikasi konsumsi pangan tidak hanya memberikan keuntungan bagi tersedianya bahan pangan bagi penduduk, namun diharapkan juga membawa dampak positif dalam kehidupan sosial masyarakat dan perekonomian nasional.

Setiap kebijakan ini terus mengalami pembaharuan karena dianggap kurang optimal dalam pencapaian diversifikasi pangan. Hal ini penting adanya pembaharuan kebijakan jika dianggap gagal dalam mencapai tujuan atau tidak relevan lagi dengan kondisi yang dihadapi saat ini. Adapun untuk menganalisis capaian kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan evaluasi kebijakan publik.

Menurut William Dunn (2003) evaluasi kebijakan mempunyai dua aspek yang paling berhubungan, yaitu penggunaan berbagai macam

metode untuk memantau hasil kebijakan publik dan program dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil. Dunn (2003) selanjutnya membagi evaluasi kebijakan menjadi tiga berdasarkan waktu evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan sesudah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan umumnya disebut pula sebagai evaluasi proses, sementara evaluasi setelah kebijakan diimplementasikan, disebut sebagai evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan atau evaluasi dampak pengaruh (*outcome*) kebijakan, atau disebut juga sebagai evaluasi sumatif.

Secara spesifik, William Dunn (2003) merumuskan indikator evaluasi kebijakan yakni efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Secara spesifik, keenam indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator evaluasi kebijakan menurut William Dunn (2003)

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?	Unit Pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya, manfaat bersih, rasio <i>cost benefit</i>
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah	Biaya tetap Efektivitas tetap
Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria Pareto, kriteria Kaldor-Hicks, Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai	Konsistensi dengan survey warga negara

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
	kelompok-kelompok tertentu?	
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai	Program

Sumber: Wiliam Dunn (2003)

Kebijakan pemerintah tentang pangan secara umum diatur dalam melalui Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 pengganti Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996, yang dibangun berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Dalam Undang-Undang Pangan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat perorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermanfaat.

Kebijakan Peningkatan Diversifikasi Pangan merupakan salah satu prioritas dalam rencana strategis Kementerian Pertanian. Diversifikasi pangan ini merupakan salah satu kontrak kerja antara Menteri Pertanian dengan Presiden RI pada tahun 2009-2014, dengan tujuan untuk meningkatkan keanekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik wilayah. Kontrak kerja ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Dimana dalam perpres ini dijelaskan 3 tujuan utama percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah mendorong tercapainya : (1) Peningkatan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui proses internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat

termasuk aparat, yang meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga, dan promosi serta gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. (2) Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral yang berbasis sumber daya lokal, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). (3) Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan program penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Secara teknis, peraturan presiden ini selanjutnya ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Dalam peraturan ini, tepatnya pada pasal 2 menjelaskan bahwa Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal merupakan upaya percepatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi pengendalian, dan penganggaran. Adapun dalam pasal 3 poin (2) menegaskan bahwa pada tingkat provinsi, kabupaten/kota pengaturan kegiatan dijabarkan dalam

rencana bisnis penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal sebagai bagian integral dari rencana pembangunan daerah.

Secara garis besar Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 ini memuat dua hal yakni internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan bisnis dan industri pangan lokal. Peraturan tersebut kini menjadi acuan untuk mendorong upaya penganeekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta kerjasama terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Di tingkat provinsi, kebijakan tersebut harus ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur (Pergub), dan ditingkat kabupaten/kota ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwalikota) ataupun yang lain sebagainya.

Salah satu bentuk realisasi kebijakan diversifikasi pangan yakni penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan berbasis rumah tangga. Kebijakan ini sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 telah direalisasikan dalam bentuk kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Dalam upaya memperluas penerima manfaat dan pemanfaatan lahan, pada tahun 2020 kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) berubah menjadi Pekarangan Pangan Lestari atau disingkat P2L. Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk penanganan daerah prioritas intervensi stunting dan/ atau penanganan prioritas daerah rentan rawan pangan atau pemantapan daerah tahan pangan.

Implementasi kebijakan diversifikasi pangan khususnya pada program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di beberapa daerah terbukti belum optimal. Menurut penelitian Ani Tamara (2020) menunjukkan bahwa implementasi program kawasan rumah pangan lestari (KRPL) di Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran untuk tingkat keberhasilannya belum cukup maksimal karena responden hanya menanam untuk kebutuhan sehari-hari dan berupa tanaman bumbu dapur sehingga keadaan tersebut tidak dapat menutupi beban konsumsi pangan terhadap sayuran, hanya saja kondisi tersebut dapat mengurangi beban kebutuhan dasar mereka untuk membeli bumbu setidaknya menghebat sekitar 2 ribu rupiah per hari.

Selama 11 Tahun berjalan Kebijakan diversifikasi pangan khususnya program Pekarangan Pangan Lestari di Kabupaten Gowa pun belum berjalan optimal. Kemandirian pangan ini sejalan dengan visi keempat Bupati dan Wakil Bupati gowa yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 yang berbunyi Mandiri dimaknakan sebagai kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi sehingga mampu memecahkan masalahnya sendiri dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya pengembangan potensi sumber daya alam lokal dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan analisis data dan observasi awal penulis di lapangan ditemukan beberapa masalah diantaranya:

Pertama, efektifitas kebijakan ini belum optimal karena rendahnya capaian dari tujuan kebijakan khususnya dalam hal keberlanjutan dalam mewujudkan kemandirian. Menurut informasi dari Dinas ketahanan pangan Kabupaten Gowa, tingkat keberhasilankelompok tani untuk mencapai mandirimasih rendah dan hanya bisa bertahan pada tahap pengadaan dan penanaman.

Kedua, dari segi efisiensi menunjukkan bahwa kebijakan ini belum mencapai target yang diinginkan yakni kehadiran kelompok tani di setiap daerah yang mampu merepresentasikan keseluruhan dari wilayah Kabupaten Gowa. Walaupun kebijakan ini memiliki dua sumber yakni APBD dan APBN.

Ketiga, dari segi pemerataan kebijakan, program dari kebijakan ini belum merata di semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa terdapat 3 Kecamatan yang tidak pernah merasakan program dari kebijakan ini yakni Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Manuju dan Kecamatan Tombolo Pao. Selanjutnya, dua Kecamatan yang hanya mendapatkan satu kelompok tani yakni Kecamatan Barombong dan Kecamatan Somba Opu. Disisi lain, Bontonompo mendapatkan 6 kelompok tani masing–masing 2 pada tahun 2020 dan 4 pada tahun 2021. Disusul Kecamatan Bajeng dengan 5 kelompok tani khusus ditahun 2021. Hal ini menandakan bahwa penyebaran program dari kebijakan diversifikasi pangan di Kabupaten Gowa belum dilakukan secara merata. Hal ini juga terjadi pada sebaran program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang bersumber dari APBD.

Adapun data jumlah sebaran program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang bersumber dari APBD serta sebarannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Usulan Penerima Bantuan Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Kabupaten Gowa 2020 yang bersumber dari APBD

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok
1.	Bajeng	7
2.	Bajeng Barat	3
3.	Barombong	4
4.	Biringbulu	0
5.	Bontolempangan	2
6.	Bontomarannu	3
7.	Bontonompo	2
8.	Bontonompo Selatan	0
9.	Bungaya	0
10.	Manuju	1
11.	Pallangga	5
12.	Parangloe	1
13.	Parigi	0
14.	Pattallassang	1
15.	Somba Opu	3
16.	Tinggimoncong	1
17.	Tompobulu	1
18.	Tombolo Pao	0
	Total	34

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

Sebaran program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dari kebijakan diversifikasi pangan ini juga tidak merata di semua kecamatan, hal ini terlihat dari tabel di atas dimana terdapat beberapa kecamatan yang tidak mendapatkan program yakni Kecamatan Tombolo Pao, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Parigi dan Kecamatan Bontonompo Selatan. Disisi

lain justru dominan pada Kecamatan Bajeng yakni 7 kelompok dan disusul Kecamatan Pallangga dengan 5 kelompok.

Keempat, dari segi ketepatan menunjukkan bahwa kebijakan ini belum memberi manfaat signifikan dalam penyediaan pangan di Kabupaten Gowa. Hal ini karena berdasarkan observasi penulis ditemukan bahwa pembentukan dan penunjukan kelompok wanita tani penerima program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) belum berbasis pada variabel ketepatan, selain itu ditemukan indikasi intervensi pemerintah setempat dalam pembentukan kelompok wanita tani. Dimana kelompok yang dibentuk adalah yang memiliki akses khusus ke pemerintah, walaupun secara kapasitas kelompok tani ini kurang kompeten dalam bidang pertanian. Kondisi lain yang ditemukan adalah pada penganggaran kelompok wanita tani yang bersumber dari APBD, dimana kelompok yang dibentuk atau direkomendasikan berasal dari kalangan konstituen anggota DPRD, hal ini terjadi karena kebijakan tersebut mengikut pada anggaran aspirasi DPRD.

Kelima dari segi kecukupan, kebijakan ini belum mampu memecahkan masalah diversifikasi pangan di Kabupaten Gowa. Hal ini karena belum adanya model intervensi pemerintah dalam hal pemasaran hasil akhir dari program kebijakan ini. Sehingga sayur yang dihasilkan harus dijual sendiri oleh kelompok masyarakat tersebut. Jika kelompok-kelompok wanita tani ini tidak mampu mengatur dan mendistribusikan hasil kebun mereka, maka akan sulit untuk menjual hasil produksinya. Selama 10 tahun,

kebijakan ini juga dianggap belum optimal mencapai tujuannya yakni dalam mencegah stunting di Kabupaten Gowa.

Keenam, reponsivitas kebijakan ini belum mampu memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Hal ini karena kebijakan ini belum memberikan kepuasan kepada masyarakat karena belum adanya keadilan terhadap akses mendapatkan program ini karena jumlahnya yang terbatas serta belum mampu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Gowa.

Dari berbagai permasalahan pelaksanaan kebijakan ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi sehingga tujuan kebijakan diversifikasi pangan di Kabupaten Gowa ini belum mampu tercapai. Karena kebijakan ini telah berjalan selama 10 tahun, maka penting untuk dilakukan evaluasi tentang capaian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa ini.

Berdasarkan gambaran permasalahan berbagai aspek ketidaktercapaian kriteria dalam evaluasi kebijakan yang dijelaskan oleh William N Dunn serta masih terbatasnya kajian evaluasi kebijakan dari sudut pandang kriteria keberhasilan program, khususnya pada kasus diversifikasi pangan. Di samping itu, permasalahan pelaksanaan kebijakan mengalami berbagai hambatan di Kabupaten Gowa. Karena kebijakan ini telah berjalan selama 10 tahun, maka penting untuk dilakukan evaluasi

tentang capaian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa ini.

Kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu pada program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang selanjutnya di tahun 2019 berubah menjadi Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Adapun kedua program tersebut bersumber dari APBN yang merupakan program Kementerian Pertanian. Selain itu terdapat program yang merupakan inisiatif pemerintah Kabupaten Gowa yang menggunakan anggaran APBD. Sehingga evaluasi dari beberapa program ini selanjutnya dikaji berdasarkan evaluasi kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga yang dilaksanakan di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul ***Evaluasi Kebijakan Diversifikasi Pangan Berbasis Rumah Tangga di Kabupaten Gowa***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa ?
2. Bagaimana efisiensi kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa ?
3. Bagaimana kecukupan kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa ?

4. Bagaimana perataan kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa ?
5. Bagaimana responsivitas kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa ?
6. Bagaimana ketepatan kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa ?
7. Bagaimana model Kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis efektifitas kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa
2. Mendeskripsikan dan menganalisis efisiensi kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa
3. Mendeskripsikan dan menganalisis kecukupan kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa
4. Mendeskripsikan dan menganalisis perataan kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa
5. Mendeskripsikan dan menganalisis responsivitas kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa
6. Mendeskripsikan dan menganalisis ketepatan kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa

8. Menemukan rekomendasi model (*recommended model*) kebijakan yang efektif pada diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa

D. Manfaat Penelitian

Secara akademik kajian ini dimaksudkan untuk meninjau evaluasi kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa khususnya pada daerah otonom kabupaten dan kota dalam mengatur dan mengurus urusan diversifikasi pangan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat.

Melalui penggunaan metode analisis kualitatif, harapan utama dari hasil kajian ini adalah memberi pengayaan dalam pengembangan kajian ilmu administrasi publik, khususnya mengenai evaluasi kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga pada pemerintahan daerah.

Manfaat pragmatis, secara umum hasil-hasil kajian ini dapat memberi kontribusi pemikiran dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam mengatur dan mengurus urusan diversifikasi pangan yang menjadi wewenangnya. Secara khusus, hasil-hasil kajian ini menjadi masukan bagi DPRD, pemerintah daerah, dan stakeholders yang terkait dalam pengembangan penyelenggaraan kebijakan yang berpihak kepada seluruh masyarakat, baik pada tingkatan kebijakan, tingkatan manajerial (organisasi), maupun pada tingkatan operasional birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Gowa. Manfaat lain dari hasil penelitian ini adalah dapat menjadi referensi tambahan atau rujukan bagi peneliti-peneliti lain, terutama bagi peneliti yang berminat

meneliti topik tentang implementasi kebijakan pada sektor publik terutama dalam penyelenggaraan kebijakan pangan pada pemerintahan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Paradigma Administrasi Publik

Hingga saat ini telah terjadi beberapa kali perkembangan paradigma yang menjadi dasar dan tujuan serta acuan perilaku dari sistem dan proses serta implementasi administrasi publik. Paradigma administrasi publik paling awal disebut *Old Public Administration*, yang kemudian mengalami perkembangan menjadi *New Public Management*, *New Public Service*, sampai akhirnya sekarang yang disebut paradigma *New Public Governance*.

1. *Old Public Administration*

Paradigma "*Old Public Administration*" yang banyak dipengaruhi oleh model birokrasi Max Weber yang mengutamakan kontrol pemerintah terhadap masyarakat, hirarkis, procedural, top down, sentralistik, tertutup bagi publik, orientasi pertanggungjawaban pada input, tidak terukur, dan teknokratis. Ciri administrasi publik pada old administration adalah dengan banyaknya standardisasi pelayanan publik yang berasal dari pemerintah pusat yang harus dipatuhi oleh penyelenggara layanan publik di bawahnya.

Pada model ini kepentingan publik didefinisikan oleh aktor politik, dan dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan untuk dijadikan dasar pelaksanaannya oleh birokrasi. Tanggung jawab organisasi publik diarahkan kepada organisasi konstituen yaitu partai politik yang mewakili

dalam lembaga legislatif, ataupun organisasi pemerintahan lainnya yang memiliki hirarki lebih tinggi. Dengan deskripsi tersebut, pemerintah hanya berperan sebagai pelaksana (*rowing*) kebijakan yang berfokus pada ketentuan kebijakan politik. Akuntabilitas penyelenggaraan administrasi publik diarahkan kepada elit politik sebagai prinsipal penyelenggaraan pelayanan dan regulasi. Kelemahan pada era ini adalah rumusan kebijakan oleh legislatif tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat pada umumnya, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah sedikit sekali menyentuh kebutuhan publik yang sesungguhnya. Responsivitas birokrasi lambat karena peran pemerintah yang dibatasi hanya sebagai pelaksana, harus menunggu kebijakan dari legislatif atau organisasi pemerintahan lainnya yang lebih tinggi. Berdasarkan dari kekurangan tersebut, muncul alternatif pengelolaan administrasi publik baru yang kemudian di namakan "*New Public Management*".

2. *New Public Management (NPM)*

Pada "*New Public Management*" kepentingan publik dipandang sebagai agregat kepentingan yang merupakan kumpulan dari keseluruhan kepentingan individu yang berbeda-beda. Pada era ini, publik dianggap sebagai pengguna layanan yang memiliki pilihan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya, publik disediakan beberapa pilihan layanan karena pada konsep ini pelayanan publik dapat diserahkan ke beberapa pihak swasta namun tetap dalam koridor aturan main yang dibuat pemerintah.

Pada era ini pemerintahan berperan lebih sebagai pengatur (*Steering*) dan publik diberikan hak untuk memilih provider layanan sesuai kebutuhannya. Model *New Public Management* meniru model organisasi swasta yang berukuran kecil, responsive, tidak bertele-tele, efisien, dan kompetitif. Untuk itu era ini mengedepankan peran swasta dalam pemberian layanan publik bahkan pula dalam rangka pendanaannya. Begitu pula inovasi dan pemangkasan prosedur layanan publik menjadi ciri khasnya, pencapaian performa yang terukur dijadikan dasar *reward and punishment system* (Osborne, 1992). Ciri NPM adalah (1) pendelegasian layanan kepada swasta; (2) standar kinerja yang tegas dan terukur, termasuk tujuan, target, dan indikator-indikator keberhasilan kuantitatif yang jelas; (3) orientasi pertanggungjawaban kepada output; (4) sistem manajemen desentralistik; (5) transparansi; (6) *top down* dan *bottom up* (7) Penekanan pada pemangkasan, efisiensi, dan melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang sedikit. Dengan demikian akuntabilitas publik didasarkan pada nilai efisiensi dan efektifitas organisasi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Namun demikian sistem ini pun memiliki kekurangan, di mana kebutuhan masyarakat yang terpenuhi adalah kebutuhan representatif yang merupakan agregat. Hal ini mengakibatkan kelompok masyarakat terbelakang dan minoritas yang jauh dari jangkauan penyampaian dan akomodasi aspirasi tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan layanan dari pemerintah

(Denhart & Denhart, 2003). Atas kekurangan ini maka muncul paradigma baru yaitu "*New Public Service*".

3. *New Public Service (NPS)*

Pada model "*New Public Service*", kepentingan publik dipandang sebagai hasil dialog dengan masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang disepakati bersama. Pemerintah berperan sebagai negosiator dan penjembutan kepentingan di antara individu dan kelompok masyarakat, serta berperan menciptakan nilai-nilai bersama. Dengan pendekatan ini diharapkan kepentingan yang terakomodir dan dilayani oleh pemerintah adalah yang betul-betul menjadi kepentingan publik yang mendasar (Denhart & Denhart, 2003). Masyarakat dari kalangan terisolir dan minoritas juga diajak berbicara dan didengarkan aspirasinya. selanjutnya dengan adanya kenyataan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan dasar kepada warganya, maka pelayanan dasar tersebut harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan warga dan untuk warga kurang mampu, hal ini tidak dapat diserahkan kepada pasar yang umumnya berorientasi profit.

Pemerintah tidak lagi hanya mengatur tetapi lebih kepada memberikan pelayanan (*servicing*) kepada masyarakat secara langsung, dengan negosiasi dan berdialog, serta menciptakan nilai-nilai bersama. Dengan demikian publik pun bukan lagi dianggap sebagai pelanggan yang dibiarkan memilih berbagai produk layanan yang berlaku pada sistem pasar, tetapi lebih diperlakukan sebagai warga negara yang memiliki hak

untuk bersuara (*voice*) dari pada sekedar memilih (*exit*). Pada model ini pemerintahan menjalankan pelayanan umum dengan tidak mengedepankan model bisnis melainkan dalam nuansa kemanusiaan. Penghargaan terhadap martabat manusia dijadikan roh dalam pelayanan publik, para administrator lebih banyak mendengarkan dari pada memberi petunjuk serta lebih banyak melayani (*servicing*) dari pada mengarahkan (*steering*), warga negara dilibatkan bahkan didorong untuk wajib terlibat dalam proses pemerintahan serta para warga bekerja sama untuk mendefinisikan dan mengatasi masalah bersama dengan jalan kooperatif yang saling menguntungkan.

Produktifitas dan efisiensi bukan menjadi orientasi output dari *New Public Service*, karena ia mengedepankan demokratisasi, yang dicirikan dengan kemauan warga negara berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan baik perencanaan bahkan pelayanan publik, dan kepuasan publik. Dengan demikian akuntabilitas publik diukur dengan diakomodasinya semua kepentingan, dan pemberian layanan publik yang equal antar anggota masyarakat. Namun demikian, perubahan paradigma administrasi publik tidak berhenti sampai disini, *The New Public Service* tidak dapat merepresentasikan model administrasi publik yang ideal bagi masyarakat yang matang yang secara kolektif telah memiliki nilai nilai yang baik dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal inilah yang melatar belakangi munculnya paradigma baru yaitu *Governance*.

4. Governance

Berbeda dengan paradigma *NPM* dan *NPS* yang berangkat dari praktek empiris administrasi publik di berbagai negara, kelahiran *governance* merupakan gagasan yang merupakan hasil refleksi terhadap kekurangan *OPA* and *NPM* (Osborne, 2010). Meskipun sama-sama berpijak kepada kelemahan kedua paradigma tersebut, *Governance* tidak sepenuhnya sama dengan *NPS* yang murni mengedepankan pendekatan humanistik baik dalam proses layanan publik maupun manajemen sumber daya aparatur. *Governance* dapat dipraktekkan di lingkungan masyarakat yang telah memiliki tatanan yang baik dan mampu untuk menentukan pilihan layanan yang mereka butuhkan, membangun aliansi atau kerja sama antar anggota masyarakat untuk mewujudkan layanan tersebut untuk mereka sendiri.

Model *NPM* dan *NPS* kurang dapat memfasilitasi inisiasi masyarakat yang demikian, apalagi *OPA* yang menghendaki persetujuan politis untuk setiap gerakan pelayanan publik. Untuk itu *governance* dirancang sebagai bentuk administrasi publik yang dapat memfasilitasi inisiasi masyarakat dalam menentukan layanan publik yang diperlukan oleh mereka, dan memfasilitasi masyarakat untuk membangun *networks* dengan anggota masyarakat lainnya untuk memberikan layanan tersebut kepada sesama anggotanya. Akuntabilitas pelayanan publik bertumpu pada nilai *trust* (Runya, et al., 2015) atau kepercayaan antar anggota *networks* yang dipelihara oleh sistem dan aturan yang dibuat oleh anggota *networks*.

Dalam paradigman ini kapasitas organisasi pelayanan publik (*Public service organization* atau PSO) atau profesional yang diperlukan adalah kapasitas dalam membangun *networks* antar organisasi dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat, sehingga jenis-jenis pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah semakin dapat dirasakan oleh masyarakat dengan menggunakan kepanjangan tangan anggota masyarakat ataupun organisasi masyarakat secara sukarela (*Community service organization*).

Merujuk pada deskripsi di atas, paradigma ini mengedepankan aspek demokratisasi dengan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan, menciptakan, dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat lainnya. Dengan berjalannya mekanisme masyarakat ini dimana disatu sisi efisiensi pelayanan publik dapat tercapai namun demikian, paradigma ini pun mendapatkan berbagai kritik. Dengan karakteristik *networks* dan kolektivitas kelompok tertentu, dikhawatirkan bahwa layanan publik tertentu hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu, sehingga efektivitas pelayanan diragukan. Demikian juga pelibatan masyarakat atau organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik diragukan keterandalannya, terkait sangsi akan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaannya.

Tabel 3. Tabel Pergeseran paradigma administrasi public

	<i>Old Public Administration</i>	<i>New Public management</i>	<i>New Public Service</i>	<i>Governance</i>
Orientasi nilai	Rezim penguasa & procedure	Efisiensi	Demokrasi	Demokrasi dan efisiensi
Dasar teoritis	Sistem birokrasi, dikotomi administrasi dan politik	Teori ekonomi, <i>rational choice</i> , gaya manajemen sector swasta	Masyarakat demokratis, masyarakat beradab, teori organisasi humanistik, teori administrative post modern	Institution dan teori Networks
Fokus	Sistem Politik	Organisasi	Masyarakat	Organisasi dan masyarakat
Perilaku	Pemisahan pembuatan kebijakan & pelaksanaan kebijakan, pemerintahan terpusat	Pelayanan pemerintah dengan outsourcing dan marketing	Menanamkan semangat pelayanan masyarakat, kerjasama dengan sector ketiga	Kemandirian masyarakat, kepentingan masyarakat, pemerintahan yang polisentrik
Mekanisme alokasi sumber daya	Hirarkis	Pasar, kontrak klasikal	Pemerintah dan masyarakat	Networks dan kontrak dengan relasi
Peran warga negara	Penerima layanan	Sebagai Pengguna layanan	Pelayanan oleh masyarakat	Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Sumber: Osborne (1992)

B. Efektivitas

Menurut Beni (2016: 69) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas harus selalu ditekankan pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri pada lingkungannya yang berubah secara berhasil (Jack Duncan, dalam Siswadi 2012: 85). Menurut Halim (2002:14-15) efektivitas sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat yang akan memberi manfaat berupa efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat pada sasaran.

Pendapat Gibson (1996:34, dalam Sisawadi 2012:90) untuk mengukur tingkat efektivitas yaitu:

1. Produksi, adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
2. Efisiensi, adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input.
3. Kepuasan, adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Keunggulan, adalah tingkat dimana keorganisasian dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.
5. Pengembangan, adalah mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat

Steers (1977) dalam Sutrisno (2010: 148) mengemukakan ada empat kelompok variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, yaitu:

- a. Karakteristik organisasi, termasuk struktur organisasi dan teknologi,
- b. Karakteristik lingkungan, termasuk lingkungan ekstern dan intern,
- c. Karakteristik karyawan, yang meliputi keterikatan pada organisasi dan prestasi kerja,
- d. Kebijakan praktik manajemen.

Katz dan Kahn (dalam Steers 1958: 8) mendefinisikan efektivitas sebagai usaha mencapai keuntungan maksimal bagi organisasi dengan

segala cara, di sini ada dua faktor yang di anggap paling penting dalam penentuan efektivitas. Pertama konsep efisiensi, yakni sebagai perbandingan antara masukan, keluaran, energi, dan mengajukan argumentasi bahasa penyelesaian atau pemecahan ekonomis dan teknis dalam masalah organisasi. Kedua efektivitas politis, yakni sebagai usaha-usaha jangka pendek untuk memaksimalkan keuntungan untuk organisasi melalui transaksi dan pertukaran yang menguntungkan baik dengan para anggota organisasi atau dengan pihak luar organisasi.

C. Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Menurut Nugroho (2014) ada dua karakteristik dari kebijakan publik yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan

nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye (2008) mendefinisikan kebijakan publik *sebagai "is whatever government choose to do or not to do"*(apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan "tindakan" dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

David Easton (1968) memberikan definisi kebijakan publik sebagai *"the autorative allocation of values for the whole society"*. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam *"authorities in a political system"* yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam

urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

1. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn (2003) adalah sebagai berikut:

- a. Tahap penyusunan agenda para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

- b. Tahap formulasi kebijakan Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
- c. Tahap adopsi kebijakan dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.
- d. Tahap implementasi kebijakan suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

- e. Tahap evaluasi kebijakan dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2. Jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. James Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural, kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.
- b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

- c. Kebijakan material versus kebijakan simbolik, Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplit pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*) Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

William N. Dunn (2013) membedakan tipe-tipe kebijakan menjadi lima bagian, yaitu:

- a. Masalah kebijakan (*policy public*) adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan membutuhkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang mendahului adanya problem maupun informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.
- b. Alternative kebijakan (*policy alternatives*) yaitu arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat memberi sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.

- c. Tindakan kebijakan (*policy actions*) adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai.
- d. Hasil kebijakan (*policy outcomes*) adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.
- e. Hasil guna kebijakan adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberikan sumbangan pada pencapaian nilai. Pada kenyataannya jarang ada problem yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu problem dapat menumbuhkan problem lain sehingga perlu pemecahan kembali atau perumusan kembali.

Menurut Charles O. Jones (1977) kebijakan terdiri dari komponen-komponen:

- a. *Goal* atau tujuan yang diinginkan.
- b. *Plans* atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan.
- c. Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.
- d. *Decision* atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- e. Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).

Jones memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai *decision making*, yaitu ketika pemerintah membuat suatu keputusan untuk suatu tindakan tertentu. Klasifikasi ini juga dapat didefinisikan sebagai intervensi negara dengan rakyatnya ketika terdapat efek dari akibat suatu program yang dibuat oleh pemerintah yang diterapkan dalam masyarakat.

D. Implementasi Kebijakan

Karya yang dianggap mengawali era studi implementasi adalah tulisan Pressman dan Wildavsky "*Implementation*" pada tahun 1973. Tulisan mereka membahas tentang implementasi program pembangunan ekonomi perkotaan di Aucland USA, dengan mewancarai aktor pelaksana dan mengkaji dokumen–dokumen kebijakan untuk menemukan hal–hal yang tidak beres. Hasilnya adalah suatu pendekatan yang bersifat rasional perspektif dengan model sudut pandang *Top-down*. Tumbuhnya model rasional perspektif sebagai tonggak awal studi implementasi adalah sangat wajar mengingat kebutuhan saat itu adalah untuk menjawab pertanyaan mengapa banyak kebijakan mengalami kegagalan saat diimplementasikan dan bagaimana menghasilkan suatu formula implementasi yang tingkat kegagalannya rendah.

Model sudut pandang *Top-down* yang rasional perspektif ini tak lama kemudian mendapatkan kritik bertubi–tubi. Kritik pertama adalah bahwa

pandangan ini masih terlalu menitik beratkan pada sudut pandang pembuat kebijakan. Bahwa dengan menyediakan prasyarat–prasyarat sukses sebuah implementasi yang telah dihitung dan dianalisis dengan cermat oleh pembuat kebijakan dan pelaksana tingkat atas (*high level bureaucrazy*), maka kebijakan dengan sendirinya akan lebih berhasil dalam implementasinya. Pendekatan ini melupakan peran pelaksana tingkat bawah yang pada kenyataannya justru lebih banyak berperan.

Kritik kedua adalah bahwa pendekatan perspektif untuk persoalan implementasi hanya akan dapat bersifat terbatas pada ruang dan waktu serta permasalahan yang serupa. Padahal sebagaimana diketahui variasi masalah kebijakan yang luas, serta ruang dan waktu pemerintahan yang berbeda, akan memebawa perbedaan pula dalam cara pemecahan masalahnya. Oleh karena itu model *Top-down* kemudian diikuti oleh model sudut pandang *Bottom-up* dan model Sintesis.

Model *Bottom-up* yang dikomandani oleh Michael Lypsky melalui bukunya yang baru diterbitkan tahun 1980. pendekatan *Bottom-up* ini terutama merupakan kritik atas pandangan model *Top-down* yang menafikan kontribusi peran pelaksana tingkat bawah (*street level beaurocrazy*) pada proses implementasi. Pada sudut pandang ini juga lebih dipertegas bahwa proses politik bukan hanya tidak berhenti saat kebijakan sudah diputuskan, tapi juga tetap berlangsung pada level pelaksana tingkat bawah yang banyak menentukan tingkat keberhasilan implementasi. Dengan demikian perlu mempertimbangkan apa yang menjadi aspirasi,

tujuan dan kebutuhan para pelaksana termasuk kesulitan–kesulitan yang mereka hadapi. Karena apa yang menjadi masalah dalam proses implementasi bisa tampak berbeda dari perspektif level yang berbeda. Atau dengan kata lain antisipasi yang sudah dilakukan pada masalah-masalah implementasi yang akan dan dapat terjadi dari *Top Level* perspektif, bisa berlainan saat implementasi *running up* di tingkat bawah.

Sudut pandang Model Sintesis muncul sekitar tahun 1985 dengan tokohnya yang populer Randall P. Ripley & Grace Franklin. Model Sintesis ini memadukan kedua model sebelumnya (*Top-down* dan *Bottom up*) dengan tekanan utama yang bisa beragam, mulai pada jaringan interaksi antar aktor pelaksana sampai pada pendekatan sosiologis, dll, karenanya dalam beberapa literature juga disebut sebagai teori atau model *Hybrid*. Model sintesa/*hybrid* ini pada hakekatnya ingin menegaskan bahwa tidak ada model perspektif yang bisa diterapkan pada setiap masalah implementasi. Tiap kategori kebijakan memiliki kekhasan tersendiri, sehingga pendekatannya pun harus disesuaikan dengan kondisi tersebut. Model sintesa ini sangat beragam mulai dari yang hanya mengemukakan variable yang dianggap mempengaruhi implementasi. Kategori model sintesis ini sesungguhnya dilakukan hanya untuk mempermudah pengkategorian berbagai pendekatan studi implementasi yang muncul belakangan.

Wayne Parsons (2007) memberikan gambaran yang lebih rinci tentang perkembangan studi implementasi, yang bukan baru dimulai saat

model rasional *Top-down* muncul, tapi bahkan jauh sebelumnya. Berikut ini garis besar perkembangan studi implementasi berikut tokoh dan karyanya yang ia paparkan:

1. 1940-an karya Sleznick tentang TVA, yakni ‘penemuan” tahap implementasi.
2. Analisis kegagalan: Derthick (1972): Pressman dan Wildavsky (1973), Bardach (1977) yang menganalisis mengapa kebijakan gagal dilaksanakan sehingga pula mencapai tujuannya.
3. Model rasional (*Top-down*) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadikan implementasi berhasil: Van Meter dan Van Horn (1975): Hood (1976), Gunn (1975), Sabatier & Mazmanian (1979).
4. Kritik Bottom-up terhadap model Top-down dalam hal pentingnya factor lain dan interaksi organisasional: Lipsky (1971), Wetherley & Lipsky (1977), Elmore (1978, 1979), Hjern et al. (1978).
5. Teory *Hybrid/Sintesa*: Implementasi sebagai evolusi (Majone & Wildavsky, 1978): sebagai pembelajaran (Browne & Wildavsky, 1984): sebagai kontinum kebijakan tindakan (Lewis & Flynn, 1978, 1979: Barret & Fudge, 1981): sebagai analisis interorganisasional (Hjern, 1982, Hjern & Porter, 1981): implementasi dan tipe kebijakan (Ripley & Franklin 1982): sebagai bagian dari subsistem kebijakan (1986 an) dan sebagai manajemen sector publik (Hughes, 1994) dalam (Parsons, 464– 465).

Penjelasan di atas telah menjelaskan berbagai pendekatan atau model yang dikembangkan selama tahun 1970-an hingga pertengahan

1980-an, dari yang bersifat *Top-down; Bottom-up* hingga sistem antara keduanya. Hal yang perlu diingat bahwa beberapa nama yang tadinya dikenal sebagai penganut sudut pandang tertentu, seperti Wildavsky, Bardach, Paul Sabatier dan lain-lain, pada karya-karya selanjutnya mulai bergeser pada sudut pandang yang lebih bersifat sintesis, sebagai konsekuensi logis perkembangan studi yang mereka lakukan.

E. Evaluasi Kebijakan

1. Definisi Evaluasi

Dari segi bahasa evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris "evaluation" yang diserap dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi "evaluasi" yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif. Ralph Tyler (1949), yang dikenal sebagai yang pertama kali mengembangkan teori evaluasi modern mengungkapkan bahwa "*Evaluation is the process of determining to what extent the educational objectives are actually being realized*", ia mengungkapkan bahwa evaluasi adalah sebuah proses untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan bisa terealisasi.

Pendapat Peter H Rossi dan Howard E Freeman (1985) mengungkapkan bahwa "*evaluation research is a systematic application of social research procedures in assessing the conceptualization and design,*

implementation, and unity of social intervention programs”, mereka menjelaskan bahwa penelitian evaluasi adalah sebuah aplikasi prosedur penelitian sosial yang sistematis dalam menilai konseptualisasi dan perancangan, implementasi, dan kesatuan program intervensi sosial.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat implementasi kemudian melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan sudah terealisasi dengan baik atau belum, adapun tujuan dari evaluasi ialah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak.

Studi evaluasi adalah studi yang terkait dengan beberapa cabang ilmu pengetahuan lainnya. Termasuk ketika evaluasi dalam konteks kebijakan publik sebagai bagian dari disiplin ilmu Administrasi publik. Seperti yang diungkapkan oleh Peter Rossi, Howard Freeman dan Evert Vendung, yang menyatakan bahwa evaluasi adalah berkaitan dengan penelitian sosial. Pendapat para pakar ini kemudian sejalan dengan para pendahulu sebelumnya yang terkenal dengan predikat “ *Methodologist Experiment Society*”, yakni Donald Campbell. Dalam karir ilmiahnya selama 40 Tahun Campbell kemudian konsen dalam beberapa penelitian yang kemudian melahirkan perspektif evaluasi mengenai desain eksperimen murni dan eksperimen semu yang sangat mempunyai pengaruh besar terhadap penelitian ilmu sosial. Karya Campbell bersama-sama dengan Stanley yang berjudul *Experimental and quasi experimental design for*

research membahas berbagai desain untuk penelitian ilmu sosial diungkapkan sangat sistematis.

Evaluasi merupakan mekanisme untuk memonitor, mensistematis, dan meningkatkan aktivitas Pemerintah dan hasilnya sehingga para pejabat publik dalam pekerjaannya di masa akan datang dapat bertindak serta bertanggung jawab, kreatif, dan seefisien mungkin.

Beberapa pakar kemudian evaluasi kebijakan publik adalah bagian dari analisis kebijakan yang paling akhir untuk menentukan apakah program maupun kebijakan yang dikeluarkan dapat mencapai hasil yang diharapkan dari apa yang telah direncanakan sebelumnya melalui proses formulasi dan proses yang dilaksanakan melalui implementasi, sehingga akan diketahui seberapa besar manfaat yang didapatkan dari adanya kebijakan tersebut.

Menurut William Dunn (2003), secara umum bahwa evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Dalam arti spesifik evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijaksanaan. Evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan kebijakan.

Menurut Lester dan Stewart (Leo Agustino, 2008) menjelaskan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang

dinginkan. Anderson (dalam Arikunto, 2004) memandang Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencari informasi terkait hasil dari implementasi kebijakan secara keseluruhan, kemudian melakukan penilaian terhadap hasil dari kebijakan tersebut apakah baik dalam hal pelaksanaan, manfaat untuk dijadikan bahan rekomendasi untuk kebijakan selanjutnya.

2. Konsep dan Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan secara sederhana, menurut William Dunn (2003), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Lebih lanjut Dunn (2003) menjelaskan ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi, yakni evaluasi semu; yakni pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat. Selanjutnya evaluasi formal; yakni adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Selanjutnya evaluasi proses keputusan terotitis; yakni pendekatan evaluasi yang

menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasilhasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholders.

Secara umum Dunn (2003) menjelaskan mengenai indikator-indikator dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan yakni sebagai berikut:

- a. Efektifitas; apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
- b. Efisiensi ; seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
- c. Kecukupan; seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
- d. Perataan ; apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
- e. Responsivitas; apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
- f. Ketepatan; apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Dalam perkembangannya studi evaluasi kebijakan melahirkan beberapa pendekatan-pendekatan seperti yang diungkapkan oleh William Dunn (2003), pendekatan pendekatan tersebut antara lain evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi teoritis keputusan. Berikut dijelaskan masing-masing dari ketiga pendekatan tersebut.

1. Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*)

adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*self evident*) atau tidak kontroversial.

2. Evaluasi Formal (*formal evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasilhasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijaksanaan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. Dari segi metode evaluasi formal menggunakan metode yang sama dengan evaluasi semu. Perbedaanya dengan evaluasi semu ialah bahwa evaluasi formal menggunakan undang-undang dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasi, mendefinisikan dan menspeksifikan tujuan dan target kebijakan.

3. Evaluasi Keputusan Teoritis (*Decision-Theoretic Evaluation*) adalah pendekatan dengan menggunakan metode-metode dekriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teoritis keputusan di satu sisi, dan evaluasi semu dan evaluasi formal di sisi lainnya, adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau yang dinyatakan.

Dalam evaluasi ada hal yang tentunya ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan, sebagaimana tujuan evaluasi menurut H. Weiss dalam Mulyadi (2016) yang menyatakan, "*to measure the effect of a Program against the goals it set to accomplish as a means of contributing to subsequent decision making about the program improving future programing*". Weiss menyatakan bahwa tujuan analisis evaluasi adalah bagaimana melakukan pengukuran efek dan dampak dari sebuah program atau kebijakan yang ada pada masyarakat. Beberapa tujuan dan fungsi evaluasi adalah :

- a. Mengukur efek suatu program/kebijakan pada kehidupan masyarakat dengan membandingkan kondisi antara sebelum dan setelah adanya program tersebut;
- b. Mengukur kepatuhan, artinya mampu melihat keseusian antara pelaksanaan dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan;

- c. Memberikan ekplanasi yang logis atas realitas pelaksanaan sebuah program/kebijakan;
- d. Memperoleh informasi tentang kinerja implementasi kebijakan serta menilai kesesuaian dan perubahan program dengan rencana;
- e. Memberikan umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan/penyempurnaan implementasi;
- f. Melakukan auditing untuk melihat output kebijakan sampai pada sasaran yang dituju, ada tidaknya kebocoran dalam penyimpangan pada penggunaan anggaran, ada tidaknya penyimpangan tujuan dan pelaksanaan program
- g. Akunting untuk melihat dan mengukur akibat sosial ekonomi dari kebijakan. Misalnya seberapa efektif program yang dimaksud dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dampak yang ditimbulkan telah sesuai dengan yang diharapkan;
- h. Memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut mengenai program pada masa mendatang, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dalam memenuhi akuntabilitas publik (Anggara :2014, Dunn :2003) dan Ripley :1985).

Sebagai pembanding James P. Lester dan Joseph Steward Jr. (Nugroho, 2009) mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi; evaluasi impak, yaitu evaluasi berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh dari implementasi kebijakan; evaluasi kebijakan yaitu

apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki; dan evaluasi metaevaluasi yang berkenaan dengan evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

Sedangkan James Anderson (Winarno,2012), membagi evaluasi kebijakan publik menjadi tiga, tipe pertama, evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional. Kedua, evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan. Ketiga, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai.

Edward A. Suchman (Winarno, 2012) disisi lain mengemukakan enam langkah dalam mengevaluasi suatu kebijakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
- b. Analisis terhadap masalah
- c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
- d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
- e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain
- f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Dalam perkembangannya, evaluasi sangat diperlukan dalam melihat kinerja dari kebijakan/program itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh

Samodra Wibawa (1994), bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu sebagai berikut.

- a. Eksplanasi; melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan actor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan
- b. Kepatuhan; melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan para pelaku, maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c. Audit; melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- d. Akunting; dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Subarsono (2011) menjelaskan bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan yakni:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.

- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, ditunjukkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif .
- e. Untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- f. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

3. Kriteria Evaluasi

Kriteria Evaluasi Menurut Dunn (2003) yaitu Efektivitas Kebijakan, Efisiensi dalam pelaksanaan Kebijakan, Kecukupan terhadap kebutuhan; Perataan Dalam Pelaksanaan kebijakan; Responsifitas; Ketepatan Program.

a. Efektivitas

Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

b. Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

c. Kecukupan

Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.

d. Perataan

Kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-

kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata, kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

e. Responsivitas

Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok- kelompok masyarakat tertentu. Responsifitas dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.

Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn (2003) pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

f. Ketepatan

Kelayakan (*Appropriateness*) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada) misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

F. Kebijakan Diversifikasi Pangan

Penganekaragaman pangan atau diversifikasi pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi yang seimbang (Bappenas, 2007). Program penganekaragaman pangan atau diversifikasi pangan pada awalnya dikenal sebagai upaya perbaikan menu makanan rakyat yang sudah dimulai di Indonesia sejak awal tahun 1960-an. Berbagai upaya penganekaragaman pangan terus dilakukan hingga saat ini (Rachman, 2008).

Kebijakan dan strategi program diversifikasi pangan dilaksanakan dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat agar bersedia dan sesuai dengan kemampuannya, melaksanakan kegiatan diversifikasi pangan dan untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan pangan impor dengan cara mengembangkan produk makanan yang berasal dari pangan lokal. Upaya percepatan diversifikasi pangan dalam jangka pendek dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Internalisasi, sosialisasi, promosi, dan publikasi rencana aksi diversifikasi pangan,
2. Peningkatan ketersediaan pangan berbasis pada potensi sumber daya lokal suatu daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan,
3. Peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengembangan diversifikasi pangan,
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan diversifikasi pangan, dan
5. Pemantauan pelaksanaan kegiatan diversifikasi pangan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan.

Ketahanan pangan memiliki tiga dimensi utama, ketersediaan pangan, aksesibilitas dan kontinuitas. Diversifikasi pangan memiliki keterkaitan sangat banyak dengan ketahanan pangan karena merupakan perwujudan gagasan bahwa makanan harus tersedia dalam berbagai lebih luas pada titik tertentu dalam waktu atau dari waktu ke waktu, maka akan meningkatkan tiga dimensi ketahanan pangan.

1. ***Strategi Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009***

a. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Salah satu faktor penting yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian program penganekaragaman konsumsi pangan adalah masih terbatasnya kebijakan dan program yang berhubungan dengan proses internalisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman pada tingkat rumah tangga. Pengetahuan tentang penganekaragaman konsumsi pangan yang dimiliki oleh setiap individu, terutama wanita sangat penting dalam membentuk pola makan yang memenuhi kriteria gizi seimbang. Proses internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

- 1) Advokasi, kampanye, promosi, dan sosialisasi tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat.
- 2) Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non-formal.

b. Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal

Keberhasilan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan ditentukan oleh ketersediaan aneka ragam pangan dan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi aneka ragam pangan. Efektivitas percepatan penganekaragaman konsumsi pangan akan tercapai apabila upaya internalisasi didukung dan berjalan seiring dengan pengembangan bisnis

pangan. Oleh karena itu program penganeekaragaman konsumsi pangan nasional dan daerah perlu diselaraskan, khususnya dalam pengembangan pertanian, perikanan dan industri pengolahan pangan guna memajukan perekonomian wilayah. Kondisi ini menuntut komitmen yang tinggi dari berbagai pihak serta memerlukan rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan yang komprehensif. Untuk itu rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan tersebut perlu dikembangkan untuk membangun sistem inovasi nasional dan daerah guna merangsang pematapan pelaksanaan penganeekaragaman konsumsi pangan di berbagai daerah. Dalam rencana tersebut, perlu dinyatakan tentang peranan industri swasta nasional dan daerah khususnya dalam program pengembangan industri aneka ragam pangan.

Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

- 1) Fasilitasi kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal.
- 2) Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama kepada usaha rumah tangga dan UMKM.

Melalui kedua strategi tersebut, keberhasilan penganeekaragaman konsumsi pangan akan tercermin dari 4 indikator yaitu:

- (1) Menu makanan sehari-hari makin beragam bergizi seimbang dan aman.
- (2) Peran swasta dan Pemerintah dalam memanfaatkan keragaman sumber daya lokal makin meningkat.
- (3) Aneka ragam makanan berbasis sumber daya lokal semakin banyak tersedia di masyarakat, memiliki citra yang baik, rasa enak, dan harga kompetitif.
- (4) Teknologi kuliner dan bisnis bidang makanan berskala mikro, kecil dan menengah berdasarkan kearifan dan budaya lokal semakin berkembang.

2. ***Tata Laksana Kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal menurut Permentan nomor 43 tahun 2009***

a. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing unit kerja eselon I yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, yang diselenggarakan pada awal tahun termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran, sesuai dengan ketentuan.

b. Pelaksana Kegiatan

Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh unit

kerja lingkup Departemen Pertanian di pusat dan daerah. Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui wadah Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

3. ***Pelaksanaan Kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal menurut Permentan nomor 43 tahun 2009***

Pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut:

a) Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan

1) Kegiatan internalisasi difokuskan pada kegiatan:

- advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi berbasis sumber daya lokal;
- kampanye dalam rangka penyadaran/awareness kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh masyarakat khususnya kelompok wanita dan Tim Penggerak PKK dalam rangka

mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal

- penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja. terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar kita;
- pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan anekaragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal:
- pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terhadap pengolahan aneka pangan;
- pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

2) Pelaksanaan kegiatan internalisasi mencakup:

- Aspek ketersediaan pangan: Advokasi pengembangan agribisnis
- Aspek distribusi pangan: penyebarluasan informasi pasokan dan harga bahan pangan melalui media cetak dan elektronik secara rutin.

- Aspek konsumsi pangan: Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi, serta sosialisasi pengembangan konsumsi dan keamanan pangan; optimalisasi pemanfaatan pekarangan; pengembangan aneka olahan berbasis pangan lokal yang memenuhi standar, mutu dan keamanan pangan: serta pelatihan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan.
 - Dukungan kelembagaan: Penyuluhan pertanian, pendampingan; penyebarluasan informasi melalui media massa; advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi; serta pendidikan konsumsi pangan
- b) pengembangan bisnis dan industri pangan local
1. Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan difokuskan pada: Fasilitasi kepada kelompok tani/gapoktan untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan antara lain:
 - Bantuan alat penepungan.
 - Pengembangan resep-resep aneka olahan pangan lokal.
 - Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan local
 2. Penerapan standar mutu dan keamanan pangan
 - Penerapan standar mutu terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga.
 - Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar.

3. Peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal.
4. Penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.
5. Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup:
 - Aspek ketersediaan pangan: Pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan pangan lainnya
 - Aspek distribusi pangan: Fasilitasi penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal, serta stabilisasi harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal.
 - Aspek konsumsi pangan: uji proksimat; uji dapur resep menu makanan; pelatihan mutu dan keamanan pangan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal; penumbuhan kelompok tani/gapoktan bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman; serta pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan panganekaragaman
 - Dukungan kelembagaan: Penyuluhan dan pendampingan, serta penyebarluasan informasi dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

g. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan secara terintegrasi, periodik dan berkesinambungan melalui koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

h. Tata Hubungan Kerja

Untuk memperlancar kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009, dibentuk Tim Teknis dengan keanggotaan dari instansi terkait dalam koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Seluruh anggota Tim Teknis berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi program dan anggaran.

G. Program Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat.

Badan Ketahanan Pangan (BKP) melalui Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan kembali akan melaksanakan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), dalam rangka mempercepat penganekaragaman pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan model pemanfaatan setiap jengkal lahan termasuk lahan tidur, lahan kosong yang tidak produktif pada pekarangan, sebagai penghasil pangan serta memenuhi pangan dan gizi keluarga, sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) juga dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk penanganan daerah stunting, Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja), penanganan wilayah rentan rawan pangan dan pengembangan daerah perbatasan. Pada Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang mendukung kegiatan bekerja, akan diberikan bantuan ternak unggas dan sarananya untuk peningkatan produksi ternak unggas melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan peningkatan konsumsi pangan dan gizi.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan:

1. Memberikan acuan pelaksanaan teknis kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun penerima manfaat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi berbagai pihak dalam pengelolaan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
3. Meningkatkan akses pangan dan produksi ternak untuk peningkatan konsumsi pangan dan gizi keluarga.

Sasaran:

Terlaksananya kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di 2.300 kelompok penumbuhan (baru) dan 2.300 kelompok pengembangan (lanjutan) di 34 provinsi.

Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita dan kelompok masyarakat lainnya untuk budidaya berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan sebagai tambahan untuk memenuhi ketersediaan pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral maupun pengolahan hasil. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dapat dilakukan pada pekarangan serta lingkungan perumahan lainnya seperti asrama, pondok pesantren, rusun dan sejenisnya agar terbentuk suatu kawasan yang kaya sumber pangan yang diproduksi sendiri. Pendekatan pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dilakukan melalui pengembangan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), pemanfaatan sumberdaya lokal (*local wisdom*) dan pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dilakukan melalui pengembangan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), pemanfaatan sumberdaya lokal (*local wisdom*)

dan pemberdayaan masyarakat. Secara konseptual kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tahun 2019 dilaksanakan dalam 2 tipe, yaitu:

1. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Bekerja adalah kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dialokasikan untuk mendukung program Bekerja secara langsung. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program Bekerja berdasarkan Permentan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019. Kegiatan KRPL Bekerja merupakan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan berbasis tanaman dan ternak. Budidaya tanaman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sumber karbohidrat, vitamin dan mineral, sedangkan ternak selain sebagai sumber protein juga sebagai sumber pendapatan rumah tangga dalam rangka pengentasan kemiskinan. Komponen kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Bekerja: (1) pengembangan pekarangan, (2) ternak unggas, dan (3) kandang
2. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Non Bekerja
Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Non Bekerja merupakan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang tidak termasuk lokasi Bekerja BKP sesuai Permentan Nomor 43 Tahun 2018. Komponen kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Non Bekerja: (1) pekarangan, (2) demplot, dan (3) pengembangan pekarangan.

Strategi Pelaksanaan Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) akan dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu: 1. Tahap Penumbuhan (Tahun Pertama) Pada tahap ini optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Non Bekerja mendapat bantuan pemerintah sebesar Rp 50.000.000 dan untuk Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Bekerja sebesar Rp 65.000.000. 2. Tahap Pengembangan (Tahun Kedua) Tahap ini merupakan tahap lanjutan yang ditujukan pada kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang telah ditumbuhkan pada tahun pertama dan masih aktif serta menunjukkan perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai akhir tahun 2019. Pada tahap ini kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) akan mendapatkan dana bantuan pemerintah sebesar Rp 15.000.000. 3. Tahap Kemandirian (Tahun Ketiga) pada tahap ini pemerintah pusat hanya melakukan monitoring dan pendampingan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sedangkan untuk pemeliharaan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) didampingi oleh pendamping kelompok dan kabupaten/kota, serta dikoordinasikan bersama dengan aparat provinsi dan kabupaten/kota. Pendamping dan aparat tersebut diharapkan dapat mengawal pemanfaatan dana dan membantu kelompok dalam mengatasi hambatan pelaksanaan kegiatan.

H. Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L)

Mengingat makin terbatasnya lahan pertanian, maka optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan menjadi salah satu pilihan strategis untuk meningkatkan penyediaan pangan rumah tangga. Indonesia memiliki potensi lahan pekarangan yang sangat besar, hal ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu penyedia sumber pangan yang bergizi dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

Badan Ketahanan Pangan (BKP) melalui Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 telah melaksanakan Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Dalam upaya memperluas penerima manfaat dan pemanfaatan lahan, sejak tahun 2020 kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) berubah menjadi Pekarangan Pangan Lestari atau disingkat P2L.

Berdasarkan potensi tersebut, Kementerian Pertanian berkomitmen dalam penyediaan pangan salah satunya dilakukan dengan pendekatan diversifikasi pangan lokal melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan marginal melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) merupakan upaya untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang beragam bergizi dan berimbang serta meningkatkan pendapatan rumah tangga/kelompok melalui usaha budidaya tanaman yang berorientasi pasar.

Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) merupakan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat untuk budidaya tanaman sayuran melalui kegiatan sarana pembibitan, pengembangan demplot, pertanaman, dan penanganan pasca panen. Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dapat dilakukan pada lahan tidur dan/atau lahan kosong yang tidak produktif, dan/atau lahan di sekitar rumah/bangunan tempat tinggal/fasilitas publik, serta lingkungan lainnya dengan batas kepemilikan yang jelas seperti asrama, pondok pesantren, rusun, rumah ibadah, dan lainnya. Upaya pencapaian kegiatan tersebut dilakukan melalui pendekatan pengembangan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), pemanfaatan sumber daya local (*local wisdom*), pemberdayaan masyarakat (*community engagement*) dan berorientasi pasar (*go to market*). Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dilaksanakan dalam tahapan Penumbuhan dan Pengembangan yang didanai dari APBN melalui dana dekonsentrasi.

1. Tujuan Program

- a. Meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga.
- b. Meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar.

2. Sasaran

a. Sasaran Kegiatan

- 1) Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga.

- 2) Meningkatnya pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar.

b. Sasaran Lokasi

Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Penumbuhan dan Pengembangan dilakukan di 34 provinsi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Penumbuhan di 4.500 kelompok penerima manfaat, yang berada di 3 zonasi sebagai berikut:

Zona 1: Provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bali.

Zona 2 :

- a) Provinsi di Pulau Sumatera (kecuali Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung);
- b) Provinsi di Pulau Kalimantan (kecuali Provinsi Kalimantan Utara);
- c) Provinsi di Pulau Sulawesi;
- d) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Zona 3 : Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat.

3. Strategi Pelaksanaan

Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) tahun 2021 dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu:

a. Kegiatan Tahap Penumbuhan

Calon penerima manfaat pada Tahap Penumbuhan dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Jumlah anggota kelompok Pekarangan Pangan Lestari P2L sebanyak 20 - 30 orang yang lokasi pekarangan anggotanya berada dalam satu kawasan, dan khusus Kabupaten/Kota Stunting di dalamnya terdapat sasaran prioritas penurunan stunting;
- b) Diutamakan yang memiliki pengalaman dalam budidaya tanaman sayuran minimal 1 (satu) tahun;
- c) Belum pernah mendapatkan dana bantuan pemerintah pada kegiatan yang sama;
- d) Memiliki rekening bank atas nama kelompok;
- e) Mampu menyediakan lahan untuk sarana pembibitan dan demplot dengan luas total 400-500 m² untuk pedesaan dan 100- 200 m² untuk perkotaan (bukan menyewa lahan) minimal selama lima tahun yang dituangkan dalam surat perjanjian;
- f) Bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan sanggup melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk teknis yang dibuktikan dengan pakta integritas kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

b. Kegiatan Tahap Pengembangan

Calon penerima manfaat pada Tahap Pengembangan Tahun 2021 dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Masih aktif dalam melaksanakan komponen kegiatan Tahap Penumbuhan 2020, ditunjukkan dengan fisik kegiatan yang masih berlanjut;
- b) Jumlah anggota kelompok Pekarangan Pangan Lestari P2L 30 (tiga puluh) orang dalam satu kelompok;
- c) Bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan sanggup melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk teknis yang dibuktikan dengan pakta integritas kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

I. Penelitian Tedahulu

1. Dewi Galuh Prila, Ginting Ari Mulianta. (2012) Antisipasi Krisis Pangan Melalui Kebijakan Diversifikasi Pangan (*Anticipating Food Crisis Through Food Diversification Policy*) Krisis pangan dunia merupakan ancaman bagi semua negara, termasuk Indonesia. Paradigma kebijakan pangan yang diterapkan di Indonesia harus berubah dari ketahanan pangan menjadi kemandirian pangan agar Indonesia tidak tergantung pada negara lain terutama untuk masalah pangan. Salah satu kebijakan yang sesuai untuk diterapkan dalam mencapai kemandirian pangan dan mengantisipasi krisis pangan adalah diversifikasi pangan.

Diversifikasi pangan merupakan suatu proses penganeekaragaman pangan atau upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang. Salah satu kendala pengembangan pangan lokal adalah belum dikembangkan produk turunan yang mudah diterima dan dijangkau masyarakat. Selain itu diversifikasi pangan juga terhambat oleh pemikiran masyarakat yang beranggapan bahwa hanya beras makanan pokok mereka. Salah satu cara untuk mengembangkan produk pangan lokal adalah dengan diberikannya insentif bagi perusahaan atau industri pangan yang berbahan dasar pangan lokal.

2. Hardono, Gatoet S. (2014) Strategi Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal (*Local Food Diversification Development Strategy*)
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis capaian diversifikasi konsumsi pangan dan menyusun strategi pengembangan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal. Data yang digunakan adalah data Susenas tahun 1996-2012 dari Badan Pusat statistik (BPS), Direktori Pengembangan Konsumsi dari Badan Ketahanan Pangan (BKP), dan diperkaya dengan beberapa literatur lain.

Data dan informasi yang terkait dengan capaian konsumsi pangan lokal dianalisis secara deskriptif kualitatif, sedangkan analisis penyusunan strategi pengembangan diversifikasi pangan lokal menggunakan metode SWOT. Hasil analisis menunjukkan, telah terjadi penurunan konsumsi pangan lokal, termasuk di wilayah yang sebelumnya mempunyai pola pangan pokok berbasis pangan lokal

seperti Maluku dan Papua. Sebaliknya, telah terjadi peningkatan konsumsi terigu dan turunannya. Pengembangan diversifikasi pangan sebagai bagian untuk mewujudkan kedaulatan pangan hendaknya dilakukan oleh semua kalangan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menyusun dan implementasi strategi kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan potensi lahan dan kebiasaan mengkonsumsi pangan lokal, serta pengembangan produksi, industri, dan konsumsi pangan lokal. Selain itu, juga dilakukan dengan pengembangan teknologi pengolahan pangan, menyelaraskan kebijakan produksi dan industri pangan dengan kebijakan konsumsi pangan; promosi pangan lokal yang sehat, komprehensif, dan terus menerus; penciptaan pasar pangan lokal di tingkat nasional dan wilayah; serta diikuti penyediaan produk pangan lokal yang mampu bersaing dengan produk asing.

3. Buseti, Simone. (2019). Evaluasi berbasis teori kebijakan limbah makanan: Bukti dari Italia, (*A theory-based evaluation of food waste policy: Evidence from Italy*)

Italia baru-baru ini mereformasi kebijakan limbah makanannya dengan memperkenalkan langkah-langkah inovatif, seperti kemungkinan menyumbangkan makanan setelah makanan tersebut sudah melewati di waktu “Baik dikonsumsi Sebelum” (BBD) dan penyederhanaan yang signifikan dari donasi birokrasi. Langkah-langkah ini dianjurkan oleh spesialis limbah makanan dan dianggap dapat meningkatkan donasi hampir secara otomatis. Artikel ini melakukan

evaluasi berbasis teori menggunakan metode sintesis realis untuk menyelidiki dua ukuran, menguji asumsi implisitnya, dan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang cara kerja kebijakan.

Metode sintesis realis dan lebih umum pada pendekatan berbasis teori. Berlawanan dengan kesederhanaan yang tampak, kedua fitur desain tersebut mengungkapkan kompleksitas yang tak terduga. Analisis ini memiliki kekuatan penjelas yang besar: Ini memungkinkan kita untuk mengungkap jalur sebab akibat yang tidak diinginkan dan membantu menunjukkan apa yang sebenarnya akan berhasil, bagaimana, dan untuk siapa. Kemampuan menjelaskan seperti itu tentu baik untuk membangun teori dan pengembangan konseptual, tetapi kekuatan metode berbasis teori juga praktis. Dengan menyoroti kemungkinan jebakan dalam teori program yang dihipotesiskan, seperti reaksi yang berbeda oleh aktor yang relevan atau kondisi kontekstual yang merugikan, pengetahuan yang dihasilkan memiliki relevansi praktis langsung untuk merancang, mengimplementasikan, dan mereformasi program kebijakan.

Hasilnya menyoroti pentingnya prosedur birokrasi dalam struktur biaya donasi, tanggapan beragam dari donor dan organisasi penyelamat makanan yang berbeda, dan pentingnya mempertimbangkan kapasitas dan preferensi badan amal ketika peningkatan donasi yang diharapkan. Lebih lanjut, analisis tersebut mengungkap risiko reputasi parah yang membatasi pasokan dan

permintaan makanan melewati BBD, meskipun ada ketentuan hukum yang mempromosikan donasinya.

4. Cerutti, Alessandro K. (2016) Jejak karbon dalam pengadaan publik hijau: Evaluasi kebijakan dari studi kasus di sektor pangan (*Carbon footprint in green public procurement: Policy evaluation from a case study in the food sector*).

Beberapa proyek di seluruh Eropa difokuskan pada peningkatan keberlanjutan pengadaan publik; namun, hanya sedikit dari mereka yang mengukur penghematan lingkungan yang dicapai oleh kebijakan tertentu melalui penerapan indikator penilaian dampak lingkungan. Dalam makalah ini, kami menghitung penghematan lingkungan dengan menerapkan analisis jejak karbon pada tiga kebijakan pangan yang diterapkan oleh Kota Turin (Italia) dalam layanan catering sekolah (tahun ajaran 2012/13 dan 2013/14). Kebijakan tersebut difokuskan pada (I) produksi pangan (dengan persyaratan produk terpadu atau organik), (II) asal geografis pangan (dengan persyaratan penyediaan pangan daerah) dan (III) peningkatan kualitas pangan. distribusi perkotaan (dengan persyaratan beralih ke kendaraan berbahan bakar gas). Potensi perubahan iklim dari lima makanan yang paling banyak dikonsumsi dipelajari menurut tiga fase utama rantai pasokan: produksi (termasuk semua proses dalam perspektif cradle-to-gate), penyediaan (berfokus pada transportasi dari lokasi produksi ke pusat makanan

periferal kota), dan distribusi (berfokus pada transportasi dari pusat kota ke sekolah).

Hasil studi ini menyoroti dampak iklim yang berbeda dari tiga fase rantai pasokan, khususnya 61–70% gas rumah kaca dipancarkan pada fase produksi, 6-11% pada fase penyediaan, dan 24-28% pada fase produksi. distribusi perkotaan. Akibatnya, kebijakan yang memengaruhi praktik produksi memiliki potensi terbesar untuk mengurangi jejak karbon dari layanan katering. Kebijakan lain (seperti kebijakan transportasi) dapat menimbulkan efek kontroversial. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perencanaan kebijakan keberlanjutan, penghematan emisi gas rumah kaca yang dicapai oleh setiap kebijakan harus dianalisis secara mendalam.

5. Charlier, Dorothe´ e, Risch, Anna. (2012) Evaluasi dampak langkah-langkah kebijakan publik lingkungan pada konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca di sektor perumahan Prancis (*Evaluation of the impact of environmental public policy measures on energy consumption and greenhouse gas emissions in the French residential sector*). Pengurangan konsumsi energi pada tahun 2050 hingga mencapai 50 kWhpe/m²/tahun dan pengurangan emisi GRK sebesar 75% merupakan tujuan penting dari kebijakan lingkungan di Prancis. Sektor perumahan merupakan sumber potensi penghematan energi yang signifikan. Dalam makalah ini, tujuan utama kami adalah untuk membangun model simulasi dan untuk mengevaluasi dampak dari

langkah-langkah kebijakan publik lingkungan. Membangun model simulasi menggunakan pendekatan bottom-up dengan memodelkan konsumsi energi dan emisi GRK, keputusan untuk berinvestasi dalam renovasi hemat energi dan dinamika stok perumahan. Perhatian khusus diberikan pada keputusan investasi rumah tangga mengenai renovasi rumah. Untuk menghasilkan dinamika dan struktur stok perumahan hingga tahun 2050, kami memperkenalkan variabel sosial ekonomi yang mengubah jumlah renovasi dan konstruksi baru.

Penelitian ini memiliki tiga keluaran utama. Pertama, kami memperkirakan konsumsi energi dan emisi GRK dari sektor perumahan di Prancis hingga tahun 2050. Kedua, kami mempelajari dampak tindakan kebijakan publik lingkungan. Terakhir, kami mengusulkan cara yang berbeda untuk mencapai tujuan. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kebijakan saat ini efektif, namun belum mampu untuk mencapai tujuan. Jika langkah-langkah kebijakan publik saat ini dipertahankan tanpa modifikasi, (yaitu, pengurangan pajak penghasilan, pinjaman bank tingkat nol, PPN sebesar 5,5% dan subsidi) konsumsi energi akan tetap menjadi 91,67kWhpe/m²/tahun pada tahun 2050. Jika tidak ada kebijakan publik antara tahun 2006 dan 2010, konsumsi akan menjadi 28% lebih tinggi dan emisi akan dikalikan dengan 1,5. Dengan membandingkan manfaat yang didiskon dan biaya tindakan, kami mencatat bahwa tanpa adanya kebijakan lingkungan, sangat sedikit renovasi hemat energi yang menguntungkan atau dapat dibiayai oleh

rumah tangga. Pengurangan pajak penghasilan tampaknya menjadi salah satu langkah kebijakan yang paling efisien. Efektivitas suatu kebijakan lebih kuat jika dikombinasikan dengan kebijakan lain.

6. Aparajita Mukherjee (2015) Evaluasi Kebijakan Diversifikasi Tanaman Sebagai Strategi Pengurangan Kemiskinan Pedesaan di India (*Evaluation of the Policy of Crop Diversification as a Strategy for Reduction of Rural Poverty in India*)

Makalah ini mengkaji efektivitas diversifikasi tanaman dalam memastikan ketersediaan makanan dan nutrisi yang lebih besar bagi para pembudidaya India, di bawah kondisi irigasi dan infrastruktur yang bervariasi. Kami melakukan penyelidikan empiris dengan data tingkat pertanian primer ke tingkat dan keparahan kemiskinan dan kekurangan pangan di antara petani yang sangat marjinal, marjinal dan kecil, mempraktikkan diversifikasi tanaman ke tingkat yang berbeda, di tiga distrik di provinsi India. Kelangsungan strategi juga diperiksa dengan membandingkan efisiensi tingkat pertanian dan profitabilitas tanaman bernilai tinggi tanaman tradisional.

Secara umum, hasil pengujian kami menunjukkan hubungan terbalik antara tingkat diversifikasi tanaman dan asupan kalori per kapita di seluruh wilayah. Di daerah yang menderita tanah yang buruk dan karakteristik lain yang menyulitkan untuk mengembangkan irigasi, petani terpaksa melakukan diversifikasi dari tanaman tradisional yang intensif air untuk memastikan tingkat konsumsi minimum yang dapat

diterima, tetapi mereka masih merasa sulit untuk menghindari kemiskinan dan kekurangan gizi. Sebaliknya, di tempat-tempat di mana para petani mengembangkan akses ke irigasi melalui investasi swasta, diversifikasi tanaman memungkinkan mereka untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang wajar dan pendapatan bersih yang positif. Tetapi produksi tanaman bernilai tinggi menghasilkan profitabilitas yang rendah dan inefisiensi relatif. Studi ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih langsung untuk memastikan efektivitas diversifikasi tanaman sebagai strategi pengurangan kemiskinan pedesaan di India.

7. Yanuardi, Kurnia Nur, Marita. (2017). *Evaluasi Kebijakan Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia Terlantar (Social Policy Evaluation on Social Welfare Improvement of Neglected Elderly)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil implementasi kebijakan sosial bagi lanjut usia terlantar (LUT) di Yogyakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara, focus group discussion, observasi dan analisis dokumenter.

Validasi data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial bagi lansia terlantar di DIY belum optimal yang dapat dicermati dari, jumlah LUT yang tercakup dalam kebijakan masih sedikit, kualitas pelayanan yang diberikan kepada lansia terlantar masih minim, pelibatan masyarakat

dalam mengurus LUT belum maksimal, dan belum ada kebijakan khusus mengelola LUT. Hal ini terjadi karena pertama, kebijakan sosial khusus terhadap LUT belum terbentuk, kebijakan yang ada masih bersifat parsial dan tumpang tindih dengan kebijakan kemiskinan, sehingga implementasinya tidak sensitif terhadap lansia terlantar. Kedua, ketersediaan dana dan infrastruktur di institusi keperawatan intra dan ekstra masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah LUT di DIY. Ketiga, jumlah SDM pelaksana kebijakan masih terbatas, apalagi yang berkualitas sedikit.

Pesatnya pertumbuhan teknologi telah mengubah kebijakan dan strategi pemerintah menuju e-government. E-government entah bagaimana diyakini akan meningkatkan kinerja pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji praktek sistem e-government di Pemerintah Daerah Indonesia. Meskipun Kabupaten Balangan sudah mengadopsi e-government, namun sistemnya belum berkembang seperti yang diharapkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, isu-isu kritis yang dihadapi dalam Penerapan e-government di pemerintah daerah bukan hanya masalah teknis, tetapi lebih kepada pengelolaan sistem dan kesadaran masyarakat. Pemerintah pusat perlu campur tangan untuk adopsi e-government yang lebih baik di pemerintah daerah.

8. Shi, Jia & Lee, Ching & Guo, Xuesong & Zhu, Zhengwei. (2019). Membangun model evaluasi kebijakan partisipatif berbasis pemangku

kepentingan yang terintegrasi untuk pembatasan lalu lintas perkotaan (*Constructing an integrated stakeholder-based participatory policy evaluation model for urban traffic restriction*). Studi ini mencoba mengusulkan model evaluasi kebijakan berbasis pemangku kepentingan baru untuk mendorong peningkatan evaluasi kebijakan melalui tiga fase, yaitu, (1) analisis dokumen kebijakan, (2) identifikasi evaluator, dan (3) evaluasi kebijakan partisipatif. Pada Fase 1, pilihan langkah-langkah kebijakan dan identifikasi pemangku kepentingan kebijakan dianalisis menggunakan pendekatan analisis dokumen. Pada Fase 2, prosedur identifikasi evaluator diadopsi untuk mengidentifikasi peserta kunci melalui analisis jaringan sosial (SNA). Akhirnya evaluasi komprehensif AHP-fuzzy digunakan pada fase ketiga untuk mengevaluasi kebijakan dengan lebih baik. Kemudian, studi kasus yang komprehensif dari kebijakan pembatasan lalu lintas perkotaan Kota Xi'an ditunjukkan untuk memverifikasi pendekatan ini. Partisipasi publik dan efek tidak langsung terungkap sebagai faktor vital yang mempengaruhi efektivitas dan vitalitas pengembangan kebijakan publik. Implikasinya dibahas untuk memperoleh wawasan berharga untuk saran tentang kebijakan masa depan.

9. Weckströma, Christoffer, Mladenović, Milos̃N. (2020) Evaluasi perumusan dan implementasi kebijakan angkutan umum: Studi kasus 24 kota Nordik berukuran sedang. (*Evaluation of public transport policy formulation and implementation: Case study of 24 mid-sized Nordic*

cities). Studi ini mengeksplorasi lintasan pengembangan jaringan PT di 24 kota mulai dari 100.000 hingga 500.000 penduduk, dengan tujuan untuk menarik pelajaran komparatif untuk perumusan dan implementasi kebijakan PT di seluruh dunia. Secara khusus, pertanyaan penelitian mencakup evaluasi kuantitas dan struktur layanan PT yang saat ini ditawarkan, serta evaluasi tujuan dan ukuran perencanaan. Menggunakan pendekatan metode campuran, studi kasus menggabungkan analisis dokumen dengan ukuran kinerja berdasarkan data jadwal PT (yaitu GTFS). Analisis dokumen berfokus pada tiga tema yang terkait dengan PTN: trunk-rute, lintas-rute, dan kesederhanaan jaringan. Berdasarkan tema-tema ini, lima ukuran kinerja baru dihitung untuk kota-kota, yang memungkinkan perbandingan struktural antara PTN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan PT telah mengalami pergeseran paradigma, mengubah fokus menuju pendekatan berbasis pasar. Selain itu, perbaikan PT memiliki waktu untuk struktur jaringan PT hierarkis, dengan jalur utama transit cepat, frekuensi tinggi, dilengkapi dengan layanan yang responsif terhadap permintaan. Namun, terlepas dari kesamaan dalam pendekatan perencanaan jaringan dan argumen yang digunakan untuk membenarkan pendekatan ini, ada beberapa perbedaan nasional terutama dalam implementasi PTN. Kesimpulannya, berdasarkan penilaian ini, studi ini memberikan

implikasi kebijakan untuk pengembangan proses perencanaan PT yang sedang berlangsung di negara-negara Nordik.

10. Imelda, I., Kusri, N., & Hidayat, R. (2017) Strategi Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal (*Development Strategy of Local Food Diversification*) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan diversifikasi pangan lokal di Kalimantan Barat. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Variabel yang diteliti meliputi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) dalam pengembangan diversifikasi pangan lokal di Kalimantan Barat.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pola konsumsi pangan di Kalimantan Barat dan dilanjutkan dengan analisis SWOT untuk melakukan strategi pengembangan diversifikasi pangan lokal di Kalimantan Barat. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi pengembangan diversifikasi pangan lokal di Kalimantan Barat adalah strategi SO (Strengths – Opportunities) yaitu: 1) peningkatan sinergi antara pemerintah dengan usaha mikro, kecil dan menengah untuk pengembangan lokal produk pangan, 2) pemanfaatan sistem komunikasi dan informasi pasar dalam meningkatkan pemasaran produk pangan lokal pada usaha mikro, kecil dan menengah, dan 3) pemanfaatan lahan pertanian yang belum dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pangan lokal.

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun & Judul	Hasil Kajian	Persamaan	Perbedaan
1	Dewi Galuh Prila, Ginting Ari Muliarta. (2012) Antisipasi Krisis Pangan Melalui Kebijakan Diversifikasi Pangan (<i>Anticipating Food Crisis Through Food Diversification Policy</i>)	Hasil penelitian menunjukan bahwa; Salah satu kendala pengembangan pangan lokal adalah belum dikembangkan produk turunan yang mudah diterima dan dijangkau masyarakat. Selain itu diversifikasi pangan juga terhambat oleh pemikiran masyarakat yang beranggapan bahwa hanya beras makanan pokok mereka. Salah satu cara untuk mengembangkan produk pangan lokal adalah dengan diberikannya insentif bagi perusahaan atau industri pangan yang berbahan dasar pangan lokal.	Penelitian terdahulu dan penelitian ini mengkaji tentang diversifikasi pangan, kedua penelitian menggunakan metode kualitatif	Khususnya penelitian terdahulu meneliti dan menganalisis pentingnya kebijakan diversifikasi pangan untuk mengantisipasi krisis pangan di Indonesia. Sedangkan penelitian ini meneliti sudah sampai pada evaluasi program diversifikasi pangan berbasis rumah tangga.
2	Hardono, Gatoet S. (2014) Strategi Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal (<i>Local Food Diversification Development Strategy</i>)	Hasil analisis menunjukkan, telah terjadi penurunan konsumsi pangan lokal, termasuk di wilayah yang sebelumnya mempunyai pola pangan pokok berbasis pangan lokal seperti Maluku dan Papua. Sebaliknya, telah terjadi peningkatan konsumsi terigu dan turunannya. Pengembangan diversifikasi pangan	Metode yang digunakan dalam kedua penelitian adalah kualitatif, kedua penelitian mengkaji tentang diversifikasi pangan di Indonesia	Penelitian terdahulu bertujuan untuk menganalisis capaian diversifikasi konsumsi pangan dan menyusun strategi pengembangan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal. Sedangkan penelitian ini

No	Penulis, Tahun & Judul	Hasil Kajian	Persamaan	Perbedaan
		<p>sebagai bagian untuk mewujudkan kedaulatan pangan hendaknya dilakukan oleh semua kalangan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menyusun dan implementasi strategi kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan potensi lahan dan kebiasaan mengkonsumsi pangan lokal, serta pengembangan produksi, industri, dan konsumsi pangan lokal. Selain itu, juga dilakukan dengan pengembangan teknologi pengolahan pangan, menyelaraskan kebijakan produksi dan industri pangan dengan kebijakan konsumsi pangan; promosi pangan lokal yang sehat, komprehensif, dan terus menerus; penciptaan pasar pangan lokal di tingkat nasional dan wilayah; serta diikuti penyediaan produk pangan lokal yang mampu bersaing dengan produk asing.</p>		<p>menganalisis evaluasi program diversifikasi pangan dan mencoba membangun model yang lebih efektif untuk pemerintah daerah</p>
3	Buseti, Simone. (2019). Evaluasi berbasis teori kebijakan limbah makanan: Bukti	Hasilnya menyoroti pentingnya prosedur birokrasi dalam struktur biaya donasi, tanggapan beragam dari donor dan organisasi penyelamat	Kajian penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama	Penelitian terdahulu melakukan evaluasi berbasis teori menggunakan

No	Penulis, Tahun & Judul	Hasil Kajian	Persamaan	Perbedaan
	dari Italia, (<i>A theory-based evaluation of food waste policy: Evidence from Italy</i>)	makanan yang berbeda, dan pentingnya mempertimbangkan kapasitas dan preferensi badan amal ketika peningkatan donasi yang diharapkan. Lebih lanjut, analisis tersebut mengungkap risiko reputasi parah yang membatasi pasokan dan permintaan makanan melewati BBD, meskipun ada ketentuan hukum yang mempromosikan donasinya.	berada dalam lingkup penelitian evaluasi kebijakan publik	metode sintesis realis untuk menyelidiki dua ukuran, menguji asumsi implisitnya, dan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang cara kerja kebijakan. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melihat evaluasi program diversifikasi pangan yang telah di implementasikan oleh pemerintah.
4	Cerutti, Alessandro K. (2016) Jejak karbon dalam pengadaan publik hijau: Evaluasi kebijakan dari studi kasus di sektor pangan (<i>Carbon footprint in green public procurement: Policy evaluation from a case study in the food sector</i>).	Hasil studi ini menyoroti dampak iklim yang berbeda dari tiga fase rantai pasokan, khususnya 61–70% gas rumah kaca dipancarkan pada fase produksi, 6-11% pada fase penyediaan, dan 24-28% pada fase produksi. distribusi perkotaan. Akibatnya, kebijakan yang memengaruhi praktik produksi memiliki potensi terbesar untuk mengurangi jejak karbon dari layanan katering. Kebijakan lain (seperti kebijakan transportasi) dapat menimbulkan efek	Penelitian terdahulu dan penelitian ini berada pada fokus penelitian tentang evaluasi kebijakan. kedua penelitian menggunakan metode studi kasus	Penelitian terdahulu menghitung penghematan lingkungan dengan menerapkan analisis jejak karbon pada tiga kebijakan pangan yang diterapkan oleh Kota Turin (Italia), yang mengukur penghematan lingkungan yang dicapai oleh kebijakan tertentu melalui penerapan

No	Penulis, Tahun & Judul	Hasil Kajian	Persamaan	Perbedaan
		kontroversial. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perencanaan kebijakan keberlanjutan, penghematan emisi gas rumah kaca yang dicapai oleh setiap kebijakan harus dianalisis secara mendalam.		indikator penilaian dampak lingkungan. Penelitian ini mencoba melihat evaluasi kebijakan diversifikasi pangan.
5	Charlier, Dorothe'e, Risch, Anna. (2012) Evaluasi dampak langkah-langkah kebijakan publik lingkungan pada konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca di sektor perumahan Prancis (<i>Evaluation of the impact of environmental public policy measures on energy consumption and greenhouse gas emissions in the French residential sector</i>).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan saat ini efektif, namun belum mampu untuk mencapai tujuan. Jika langkah-langkah kebijakan publik saat ini dipertahankan tanpa modifikasi, (yaitu, pengurangan pajak penghasilan, pinjaman bank tingkat nol, PPN sebesar 5,5% dan subsidi) konsumsi energi akan tetap menjadi 91,67kWhpe/m2/tahun pada tahun 2050. Jika tidak ada kebijakan publik antara tahun 2006 dan 2010, konsumsi akan menjadi 28% lebih tinggi dan emisi akan dikalikan dengan 1,5. Dengan membandingkan manfaat yang didiskon dan biaya tindakan, kami mencatat bahwa tanpa adanya kebijakan lingkungan, sangat sedikit renovasi hemat	Kedua penelitian memiliki kajian yang sama yaitu bagaimana evaluasi kebijakan. Dan mencoba membangun model kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Penelitian terdahulu mencoba membangun model simulasi menggunakan pendekatan bottom-up dengan memodelkan konsumsi energi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melihat evaluasi program diversifikasi pangan berbasis rumah tangga.

No	Penulis, Tahun & Judul	Hasil Kajian	Persamaan	Perbedaan
		energi yang menguntungkan atau dapat dibiayai oleh rumah tangga. Pengurangan pajak penghasilan tampaknya menjadi salah satu langkah kebijakan yang paling efisien. Efektivitas suatu kebijakan lebih kuat jika dikombinasikan dengan kebijakan lain.		
6	Aparajita Mukherjee (2015) Evaluasi Kebijakan Diversifikasi Tanaman Sebagai Strategi Pengurangan Kemiskinan Pedesaan di India (<i>Evaluation of the Policy of Crop Diversification as a Strategy for Reduction of Rural Poverty in India</i>)	Hasil penelitian menunjukkan hubungan terbalik antara tingkat diversifikasi tanaman dan asupan kalori per kapita di seluruh wilayah. Di daerah yang menderita tanah yang buruk dan karakteristik lain yang menyulitkan untuk mengembangkan irigasi, petani terpaksa melakukan diversifikasi dari tanaman tradisional yang intensif air untuk memastikan tingkat konsumsi minimum yang dapat diterima, tetapi mereka masih merasa sulit untuk menghindari kemiskinan dan kekurangan gizi. Sebaliknya, di tempat-tempat di mana para petani mengembangkan akses ke irigasi melalui investasi swasta, diversifikasi tanaman memungkinkan mereka untuk mempertahankan	Kajian penelitian terdahulu dengan penelitian ini secara umum membahas evaluasi kebijakan	Penelitian terdahulu melakukan penyelidikan empiris dengan data tingkat pertanian primer ke tingkat dan keparahan kemiskinan dan kekurangan pangan di antara petani yang sangat marjinal, marjinal dan kecil, mempraktikkan diversifikasi tanaman ke tingkat yang berbeda, di tiga distrik di provinsi India. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mencoba menganalisis evaluasi kebijakan diversifikasi

No	Penulis, Tahun & Judul	Hasil Kajian	Persamaan	Perbedaan
		<p>tingkat konsumsi yang wajar dan pendapatan bersih yang positif. Tetapi produksi tanaman bernilai tinggi menghasilkan profitabilitas yang rendah dan inefisiensi relatif. Studi ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih langsung untuk memastikan efektivitas diversifikasi tanaman sebagai strategi pengurangan kemiskinan pedesaan di India.</p>		<p>pangan berbasis rumah tangga dan mencoba membangun model yang lebih efektif untuk pemerintah daerah. Penelitian terdahulu melakukan evaluasi dengan fokus pada strategi yang telah dilakukan pemerintah daerahnya.</p>
7	<p>Yanuardi, Kurnia Nur, Marita. (2017). Evaluasi Kebijakan Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia Terlantar (<i>Social Policy Evaluation on Social Welfare Improvement of Neglected Elderly</i>).</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial bagi lansia terlantar di DIY belum optimal yang dapat dicermati dari, jumlah LUT yang tercakup dalam kebijakan masih sedikit, kualitas pelayanan yang diberikan kepada lansia terlantar masih minim, pelibatan masyarakat dalam mengurus LUT belum maksimal, dan belum ada kebijakan khusus mengelola LUT. Hal ini terjadi karena pertama, kebijakan sosial khusus terhadap LUT belum terbentuk, kebijakan yang ada masih bersifat parsial</p>	<p>Fokus kajian ini berada pada evaluasi kebijakan yang juga menjadi fokus kajian penelitian terdahulu. Kedua penelitian menggunakan metode kualitatif</p>	<p>Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengevaluasi hasil implementasi kebijakan sosial bagi lanjut usia terlantar (LUT) di Yogyakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara, focus group discussion, observasi dan</p>

No	Penulis, Tahun & Judul	Hasil Kajian	Persamaan	Perbedaan
		dan tumpang tindih dengan kebijakan kemiskinan, sehingga implementasinya tidak sensitif terhadap lansia terlantar. Kedua, ketersediaan dana dan infrastruktur di institusi keperawatan intra dan ekstra masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah LUT di DIY. Ketiga, jumlah SDM pelaksana kebijakan masih terbatas, apalagi yang berkualitas sedikit.		analisis dokumenter. Untuk penelitian ini meneliti tentang evaluasi program diversifikasi pangan dengan menggunakan metode kualitatif data penelitian nantinya hanya diperoleh dari data wawancara dan data sekunder.
8	Shi, Jia & Lee, Ching & Guo, Xuesong & Zhu, Zhengwei. (2019). Membangun model evaluasi kebijakan partisipatif berbasis pemangku kepentingan yang terintegrasi untuk pembatasan lalu lintas perkotaan (<i>Constructing an integrated stakeholder-based participatory policy evaluation</i>)	Studi ini mencoba mengusulkan model evaluasi kebijakan berbasis pemangku kepentingan baru untuk mendorong peningkatan evaluasi kebijakan melalui tiga fase, yaitu, (1) analisis dokumen kebijakan, (2) identifikasi evaluator, dan (3) evaluasi kebijakan partisipatif. studi kasus yang komprehensif dari kebijakan pembatasan lalu lintas perkotaan Kota Xi'an ditunjukkan untuk memverifikasi pendekatan ini. Partisipasi publik dan efek tidak langsung terungkap sebagai faktor vital yang mempengaruhi efektivitas dan vitalitas	Memiliki kajian yg sama, yaitu fokus pada evaluasi kebijakan public. Kedua penelitian menggunakan metode studi kasus.	Penelitian sebelumnya ini mencoba mengusulkan model evaluasi kebijakan berbasis pemangku kepentingan dalam hal pembatasan lintas perkotaan sedangkan penelitian ini mencoba melihat evaluasi kebijakan program diversifikasi pangan berbasis rumah tangga.

No	Penulis, Tahun & Judul	Hasil Kajian	Persamaan	Perbedaan
	<i>model for urban traffic restriction).</i>	pengembangan kebijakan publik. Implikasinya dibahas untuk memperoleh wawasan berharga untuk saran tentang kebijakan masa depan.		
9	Weckströma, Christoffer, Mladenović, Milos̃N. (2020) Evaluasi perumusan dan implementasi kebijakan angkutan umum: Studi kasus 24 kota Nordik berukuran sedang. (<i>Evaluation of public transport policy formulation and implementation: Case study of 24 mid-sized Nordic cities</i>).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan PT telah mengalami pergeseran paradigma, mengubah fokus menuju pendekatan berbasis pasar. Selain itu, perbaikan PT memiliki waktu untuk struktur jaringan PT hierarkis, dengan jalur utama transit cepat, frekuensi tinggi, dilengkapi dengan layanan yang responsif terhadap permintaan. Namun, terlepas dari kesamaan dalam pendekatan perencanaan jaringan dan argumen yang digunakan untuk membenarkan pendekatan ini, ada beberapa perbedaan nasional terutama dalam implementasi PTN. Kesimpulannya, berdasarkan penilaian ini, studi ini memberikan implikasi kebijakan untuk pengembangan proses perencanaan PT yang sedang berlangsung di negara-negara Nordik.	Penelitian terdahulu dengan penelitian ini meneliti tentang evaluasi kebijakan. Kedua penelitian menggunakan metode studi kasus untuk mengevaluasi tujuan kebijakan.	Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengevaluasi kuantitas dan struktur layanan PT yang saat ini ditawarkan, serta evaluasi tujuan dan ukuran perencanaan kebijakan. Penelitian ini lebih khusus pada evaluasi program diversifikasi pangan. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan metode campuran, studi kasus menggabungkan analisis dokumen dengan ukuran kinerja berdasarkan data jadwal PT (yaitu GTFS). Analisis dokumen berfokus pada tiga tema yang terkait dengan

No	Penulis, Tahun & Judul	Hasil Kajian	Persamaan	Perbedaan
				PTN: trunk-rute, lintas-rute, dan kesederhanaan jaringan. Sedangkan penelitian ini hanya menggunakan metode kualitatif.
10	Imelda, I., Kusrini, N., & Hidayat, R. (2017) Strategi Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal (<i>Development Strategy of Local Food Diversification</i>)	Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi pengembangan diversifikasi pangan lokal di Kalimantan Barat adalah strategi SO (Strengths – Opportunities) yaitu: 1) peningkatan sinergi antara pemerintah dengan usaha mikro, kecil dan menengah untuk pengembangan lokal produk pangan, 2) pemanfaatan sistem komunikasi dan informasi pasar dalam meningkatkan pemasaran produk pangan lokal pada usaha mikro, kecil dan menengah, dan 3) pemanfaatan lahan pertanian yang belum dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pangan lokal.	Kajian penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama berada pada lingkup diversifikasi pangan. Kedua penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Penelitian terdahulu lebih khusus pada strategi pengembangan diversifikasi pangan, sedangkan penelitian ini meneliti diversifikasi pangan melalui evaluasi kebijakan publik.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2022

d) Kerangka Pikir

Kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga merupakan salah satu kebijakan yang dicanangkan Kementerian pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Peraturan Menteri ini merupakan aturan operasional dari peraturan presiden nomor 22 tahun 2009. Inti dari pelaksanaan kebijakan ini secara garis besar terbagi dua yakni internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

Dalam pengimplementasian kebijakan diversifikasi pangan ini salah satunya dengan pendekatan berbasis rumah tangga. Pendekatan ini selanjutnya dirumuskan dalam bentuk program yakni Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 telah melaksanakan Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Dalam upaya memperluas penerima manfaat dan pemanfaatan lahan, pada tahun 2020 kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) berubah menjadi Pekarangan Pangan Lestari atau disingkat P2L.

Kebijakan diversifikasi pangan ini telah berjalan 10 tahun di Kabupaten Gowa. Adapun sumber implementasi dari kebijakan ini berasal dari kementerian pertanian dan pemerintah daerah Kabupaten Gowa. Dalam pelaksanaannya, belum optimal, bahkan keberlanjutan program ini masih rendah.

Kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga ini selanjutnya menjadi objek yang dianalisis untuk mengetahui hasil evaluasi dari kebijakan ini. Adapun analisis yang digunakan untuk menganalisis hasil evaluasi yakni teori kriteria evaluasi William Dunn (2003) yang terdiri dari Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketetapan.

Kriteria Evaluasi Menurut Dunn (2003) yaitu Efektifitas Kebijakan, Efisiensi dalam pelaksanaan Kebijakan, Kecukupan terhadap kebutuhan; Perataan Dalam Pelaksanaan kebijakan; Responsivitas; dan Ketepatan. Adapun penjelasan masing – masing indikator yakni sebagai berikut:

- a. Efektifitas yang merujuk pada sejauh mana kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan yang dirumuskan yakni peningkatan gizi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gowa.
- b. Efisiensi (*efficiency*) merujuk pada sejauh mana jumlah kelompok penerima program dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas pada kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa.
- c. Kecukupan (*adequacy*) merujuk pada seberapa jauh keterpenuhan sumber daya baik itu anggaran maupun sumber daya lainnya yang dalam mendukung tercapainya kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di kabupaten Gowa.

- d. Perataan merujuk pada keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan diversifikasi pangan meliputi perataan penerima program di berbagai kecamatan di kabupaten Gowa.
- e. Responsivitas (*responsiveness*) merujuk pada seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok- kelompok masyarakat tertentu. Dalam hal ini tanggapan kelompok penerima program maupun masyarakat atas penerapan kebijakan diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di kabupaten Gowa.
- f. Ketepatan (*Appropriateness*) merujuk seberapa jauh kesuaian pejabaran kebijakan berupa program – program terhadap tercapainya diversifikasi pangan berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa.

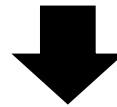
Hasil analisis dari evaluasi kebijakan berdasarkan indikator tersebut selanjutnya menjadi landasan dalam merumuskan model kebijakan yang efektif penguatan diversifikasi pangan di Kabupaten Gowa. Untuk lebih jelasnya, kerangka piker penelitian ini dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Evaluasi Kebijakan Diversifikasi Pangan Berbasis Rumah Tangga

1. UUD No.18 Tahun 2012
2. Perpres No.22 tahun 2009
3. Permentan No.43 tahun 2009

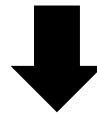


Evaluasi kebijakan diversifikasi pangan melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kabupaten Gowa



Kriteria Evaluasi(William Dunn 2003)

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketetapan



**Model Kebijakan
yang Efektif untuk Penguatan Diversifikasi Pangan
berbasis rumah tangga di Kabupaten Gowa**

Gambar 1 . Kerangka Pikir